

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH**

**(Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang  
Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana (S-1)  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**SANTOS RIMBA BHIRAWAN**

**NIM. 0810310119**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

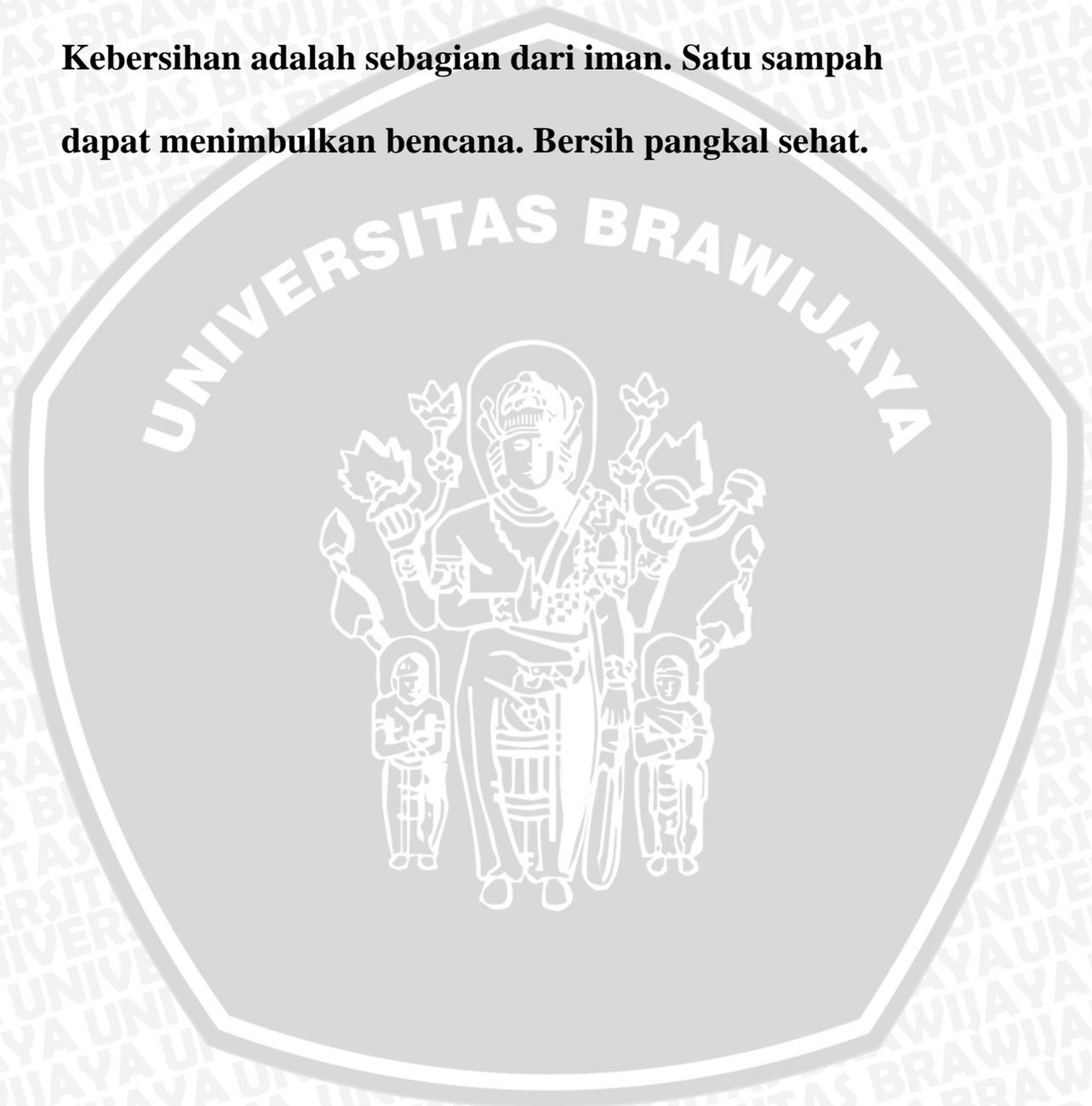
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2015**

**MOTTO**

**Kebersihan adalah sebagian dari iman. Satu sampah  
dapat menimbulkan bencana. Bersih pangkal sehat.**



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu

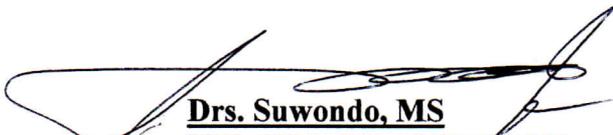
Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 20 Agustus 2015  
Jam : 10.00-11.00  
Skripsi atas nama : Santos Rimba Bhirawan  
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah  
(Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu  
(TPST) Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo  
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).

Dan dinyatakan **LULUS**

### MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Drs. Suwondo, MS**  
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota



**Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP**  
NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota



**Drs. Siswidiyanto, MS**  
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



**Drs. Dwi Sulistyono, M.PA**  
NIP. 19590529 198403 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

---

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Santos Rimba Bhirawan

NIM : 0810310119

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 4 Agustus 2015

**Komisi Pembimbing**

Ketua Komisi Pembimbing

**Drs. Suwondo, MS.**  
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota Komisi Pembimbing

**Drs. Stefanus Panirengu, M.AP**  
NIP. 19531113 198212 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Agustus 2015



Nama : Santos Rimba Bhirawan  
NIM : 0810310119

## RINGKASAN

Santos Rimba Bhirawan. 2015. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)**. Tugas Akhir, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pembimbing: (1) Drs. Suwondo, MS. (2) Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP.

Beralihnya pola pemerintah sentralisasi pada masa orde baru ke pola pemerintah desentralisasi pada era reformasi ini telah melahirkan sejumlah konsep pembangunan yang arahnya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan dan lingkungan hidup terjalin hubungan saling mempengaruhi. Pembangunan tergantung pada lingkungan dan lingkungan tergantung pada pembangunan. Salah satu bentuk permasalahan yang dihadapi pemerintah sekarang ini adalah tentang sampah. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan ikut aktif mengelola masalah persampahan sangat diharapkan oleh pemerintah.

Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang jenisnya tergantung dari aktivitasnya. Setiap jenis sampah memiliki metode pengolahan yang berbeda. Oleh karena itu, kunci dari pengelolaan sampah adalah pemilahan, atau pemisahan antara jenis sampah yang satu dengan yang lain. Pada dasarnya pengelolaan sampah terdiri atas beberapa tahapan proses antara lain, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian adalah 1. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan/menikmati hasil, dan partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. 2. Proses dalam pengelolaan sampah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan sampah. Lokasi penelitian adalah Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu.

Di desa cepokomulyo, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di lakukan dalam bentuk menyumbangkan ide pemikiran, saran atau usulan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga, uang atau materi. Pada tahap pemanfaatan/menikmati hasil, masyarakat diharapkan bisa merasakan manfaat dari pengelolaan sampah sehingga mereka bisa terus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi pada tahap pengawasan, dalam hal ini masyarakat di desa cepokomulyo melapor ketika ada petugas yang telat dalam pengambilan sampah

dan melapor jika tempat sampah yang disediakan di depan rumah masing-masing warga rusak.

Partisipasi masyarakat Desa Cepokomulyo dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik karena masyarakat ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi masih ada kekurangan dalam hal pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengerti fungsi dan manfaat dari sampah.



## SUMMARY

Santos Rimba Bhirawan. 2015. **People Participation to Garbage Management (Study in Sumedang Bersatu integrated garbage treatment facilities at Cepokomulyo Village Sub district of Kepanjen in the Regency of Malang)**. Final Assignment, Administration science Faculty of Brawijaya University. Supervisors: (1) Drs. Suwondo, MS. (2) Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP.

Alteration of centralization government system in new orde periode to decentralization government system in reformation periode have induced numerous development concepts which have a purpose to improve the role of people in development implementation. Basically, development process and environment have a mutual relationship which can give influence each other. Development is based on environment and environment does, either. Garbage management became one of major community problems to be solved by Government, recently. Community participation in keeping a good sanitation, especially by solving some garbage management problems, was expected by Government.

Everyday, people produce many different kinds of garbage depend on their activities. Each kind of garbage have different types of processing method. Therefore, the key of garbage management is sorting process between one kind of garbage with another. Basically, garbage management contain of some processing stages such as container packaging, accumulation, transportation, and manufacturing of garbage.

In this study, research method used was qualitative study with descriptive approach. The research focus are 1) people participation to garbage management that includes people participation in planning, implementation, utilization, and monitoring process of garbage, and 2) garbage management process that includes container packaging, accumulation, mobilization, transportation, and manufacturing of waste. The research was undertaken at Cepokomulyo Village, Kepanjen Subdistrict, Malang Regency.

In Cepokomulyo Village, people participation on planning process was conducted in the form of collecting some ideas, suggestions, or advices. Meanwhile, for the implementation process, people participation in the form of power/energy, money, or material needed. In the utilization process, people was expected to enjoy the benefit of garbage management so that they can continue did it. people was expected to participate in monitoring process too. In this phase, the people must give information when there is a delaying process in garbage with-drawal by employee, or give a report when their garbage can is damaged/broken.

Result showed that people participation of garbage management in Cepokomulyo Village was good enough because people has participated directly and indirectly, either. However, there still be a lack information in garbage sorting and manufacturing process. Government must be more active to give information to the people about community-based garbage management so that they will be more understand about the functions and benefits of garbage.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Suwondo, MS selaku Ketua komisi pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP selaku Anggota komisi pembimbing yang telah banyak membimbing penulis.



5. Bapak Drs. Siswidiyanto, MS selaku Dosen Penguji 1
6. Bapak Drs. Dwi Sulisty, M.PA selaku Dosen Penguji 2
7. Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Agustus 2015

Penulis



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda Sumarmi dan Ayahanda Wardo Dewo tercinta yang selalu memberikan bimbingan, doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
2. Kakak Anggun Rindang Cempaka dan Adik Tristha Sevy Hanggari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Teman-teman dan saudaraku Ricky, Erbe, Ipul, Bombay, Dimas, Naufal, Maya Avinda, Jaka, Hendra, Hendrik, Lulut, Yoga, oky, Rio, Vian, Agung, Arif, Basofi, Bagas, Bendol, Jordan, Irfan, Oni, Hilmi, Yos, Mamun, Aji, Teo, Amin, Prisa, Khadid, Nandhito, Krisna, Praja, Anfal, Wakban, Somad, Ifan bule,dapid, anak-anak FIA, Dkoplak, Persehum, Knotty, Perittoz, Psychopat, Crucio, dan teman-teman saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, Terimakasih banyak doa dan dukungannya.
4. Alifah C dan Freza Novita Cahyani yang telah banyak memberikan Motivasi.  
Terima kasih penulis persembahkan kepada semua pihak yang memberikan dukungan, dorongan dan doa yang tulus ikhlas mengiringi penulis selama pengerjaan skripsi.

Malang, 4 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO ... ..</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. .Administrasi Publik .....	12
1. Istilah Administrasi .....	12
2. Istilah Administrasi Publik .....	13
3. Pengertian Pembangunan .....	20
4. Administrasi Pembangunan .....	22
a. Teori Pemberdayaan Masyarakat .....	26
b. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan .....	28
B. .Desa .....	29
1. Pengertian Pemerintah Desa .....	29
2. Otonomi Desa .....	30
3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa.....	31
C. .Partisipasi Masyarakat .....	34
1. Definisi Partisipasi .....	35
2. Jenis Partisipasi .....	37
3. Tahapan dan Bentuk Partisipasi.....	38
D. .Pengelolaan Sampah .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. .Jenis Penelitian .....	50



B. .Fokus Penelitian .....	51
C. .Lokasi dan Situs Penelitian .....	52
D. .Jenis dan Sumber Data .....	53
E... Teknik Pengumpulan Data .....	54
F... Instrumen Penelitian .....	55
G. .Metode Analisa .....	56

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. .Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	58
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang .....	58
a. Kondisi Geografis .....	58
b. Kondisi Demografis .....	60
c. Kondisi Persampahan .....	63
2. Pemerintah Kabupaten Malang .....	66
a. Visi Kabupaten Malang.....	66
b. Misi Kabupaten Malang.....	69
3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang .....	70
a. Visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang .....	70
b. Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang .....	71
c. Tujuan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang .....	71
d. Sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang .....	72
e. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.....	72
f. Sumber Daya Manusia Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang .....	73
4. Gambaran Umum Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang .....	76
B. .Penyajian Data Fokus Penelitian .....	80
1. Proses Pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo.....	80
a. Pewadahan .....	80
b. Pengumpulan .....	81
c. Pemindahan .....	82
d. Pengangkutan .....	82
e. Pengolahan .....	83
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa cepokomulyo .....	84
a. Partisipasi pada tahap perencanaan .....	84
b. Partisipasi pada tahap pelaksanaan .....	87
1. Partisipasi dalam bentuk tenaga.....	87

2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan uang atau materi .....	89
c. Partisipasi pada tahap pemanfaatan/menikmati hasil .....	91
d. Partisipasi pada tahap pengawasan .....	93
C. .Pembahasan .....	95
1. Proses pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo.....	95
a. Pewadahan .....	95
b. Pengumpulan .....	96
c. Pemindahan .....	96
d. Pengangkutan .....	96
e. Pengolahan .....	97
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Cepokomulyo .....	98
a. Partisipasi pada tahap perencanaan .....	98
b. Partisipasi pada tahap pelaksanaan .....	99
1. Partisipasi dalam bentuk tenaga .....	99
2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan Uang atau materi .....	100
c. Partisipasi pada tahap pemanfaatan/ menikmati hasil .....	101
d. Partisipasi pada tahap pengawasan .....	102
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. .Kesimpulan .....	104
B. .Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Malang .....	62
Tabel 2 Wialayah layanan UPTD Kabupaten Malang .....	64
Tabel 3 Komposisi status kepegawaian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....	74
Tabel 4 Komposisi kompetensi pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....	74
Tabel 5 Komposisi Latar Belakang Pendidikan pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....	75
Tabel 6 Komposisi penempatan pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....	75
Tabel 7 Bentuk sumbangan pikiran masyarakat Desa Cepokomulyo dalam pertemuan .....	87



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Kabupaten Malang .....	58
Gambar 2 Susunan Pengurus TPST Sumedang Bersatu .....	78
Gambar 3 TPST Sumedang Bersatu .....	79
Gambar 4 Pengolahan sampah menjadi pupuk kompos .....	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Riset Penelitian .....	Halaman 110
---	----------------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Beralihnya pola pemerintah sentralisasi pada masa orde baru ke pola pemerintah desentralisasi pada era reformasi ini telah melahirkan sejumlah konsep pembangunan yang arahnya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya sangat diperlukan agar pembangunan yang berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan hasil dari pembangunan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Partisipasi masyarakat akan dihadapkan pada suatu permasalahan, apabila masyarakat itu sendiri tidak merasa berkepentingan dan memiliki program pembangunan di daerahnya

Pendekatan dalam pembangunan pemberdayaan menekankan dalam upaya menggalang partisipasi masyarakat untuk bersatu dalam pembangunan dengan upaya pemberdayaan yang bertumpu pada masyarakat. begitu juga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dianggap sangat penting karena pembangunan yang terlalu menekankan pada peran birokrasi pemerintah dianggap kurang peka terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu pelaksanaan program-program pembangunan berarti memberikan peluang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengarahkan sumberdaya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat mensejahterakan mereka. Berhasil tidaknya pembangunan akan tergantung pada partisipasi disertai

tekad dan semangat dari seluruh masyarakat Indonesia, Serta harus didukung dengan disiplin dan tanggung jawab dari seluruh aparat pemerintah.

Sejalan dengan pembangunan nasional yang menitikberatkan skala prioritasnya pada pembangunan desa dan kelurahan, sehingga dengan demikian desa dan kelurahan sebagai pusat perhatian dari kebijakan pemerintah dalam masa pembangunan dewasa ini adalah tepat karena akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional yang merata diseluruh tanah air. Perubahan yang ada diharapkan akan terjadi peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, karena kesempatan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam arti kehidupan masyarakat yang berpendapat lebih merata, mandiri, dan terbuka serta berkembangnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan.

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama yang oleh para cendekiawan dikemukakan perlunya diberikan perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan pembangunan. Rencana pembangunan yang demikian bahkan dapat menjadi perangsang dan bersifat *inspiring* terhadap kegairahan masyarakat dalam pembangunan.karena dalam tujuan dan cara-cara perencanaan dilihat adanya arah dan prospek perkembangan kehidupan yang lebih baik di masa kemudian.

Pada dasarnya pembangunan dan lingkungan hidup terjalin hubungan saling mempengaruhi. Pembangunan tergantung pada lingkungan dan lingkungan tergantung pada pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Soemarwoto

(1989:146) bahwa “pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem”. Komplektivitas kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, telah mengakibatkan bermacam-macam permasalahan sosial dan bencana alam seperti *global warming*, banjir, tanah longsor yang dikarenakan kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Jika berbicara mengenai masalah lingkungan, salah satu bentuk permasalahan yang dihadapi pemerintah sekarang ini adalah tentang sampah. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan ikut aktif mengelola masalah persampahan sangat diharapkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena kondisi lingkungan di Indonesia sebenarnya sangat memprihatinkan, seperti yang disunting Asrul (2012) dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) menuliskan bahwa:

“.....Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Balthasar Kambuaya, bahwa fenomena pengelolaan persampahan di Indonesia sampai saat ini semakin memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten dan Kota sepertinya setengah hati dalam mengelola sampahnya di daerah, hampir semua pengelolaan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terjadi stagnan.....”.

Di Desa Cepokomulyo yang terletak di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Pada 2009 telah berhasil membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan diberi nama TPST “Sumedang Bersatu” yang digagas oleh

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berdasarkan data TPST Sumedang Bersatu, Dana Pembangunan TPST ini diperoleh dari beberapa lembaga, antara lain :

1. APBN sebesar 200 Juta Rupiah
2. APBD Kabupaten Malang sebesar 100 Juta Rupiah
3. Desa Cepokomulyo yang berupa Lahan seluas  $\pm 1442 \text{ M}^2$
4. Serta partisipasi dari masyarakat Desa Cepokomulyo

Adanya pembangunan TPST diharapkan bisa memberikan nilai ekonomis dan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini sampah bisa menghasilkan keuntungan jika dikelola dengan baik. Berdasarkan data TPST Sumedang Bersatu tahun 2014, di Desa Cepokomulyo Volume sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh tiap rumah warga kurang lebih sekitar 3 kg, dapat diperkirakan bahwa total keseluruhan volume sampah yang dihasilkan oleh Desa Cepokomulyo setiap harinya rata-rata sekitar 3 sampai dengan 4 ton sampah. Banyaknya volume sampah tanpa adanya pengelolaan yang baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Bahar (1986:7) bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik, keberadaannya sering menimbulkan masalah bagi lingkungan, seperti :

1. Sampah yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan lingkungan tidak baik secara estetika.

2. Sampah yang membusuk menghasilkan gas yang berbau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan, air yang dikeluarkan juga dapat menyebabkan pencemaran sungai, maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyebabkan tersumbatnya saluran drainase sehingga dapat menimbulkan banjir.
4. Kawasan yang padat penduduknya seperti kota besar akan kesulitan mencari lahan baru untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Secara *de jure* Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif sejak hulu sampai hilir. Lebih lanjut lagi penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah meliputi pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pada tingkat perumahan atau kelurahan, dilakukan kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R. Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.

Disini pada tahap perencanaan pemerintah diharapkan lebih gencar dalam bersosialisasi terhadap masyarakat. Sebenarnya di desa Cepokomulyo ini sudah pernah di sosialisasikan mengenai pengelolaan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat setempat, tetapi hanya sedikit masyarakat yang hadir sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai permasalahan sampah dan

pengelolaannya. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat setempat. Di sisi lain pemerintah dan kelompok swadaya masyarakat juga diharapkan lebih gencar bersosialisasi. Sosialisasi merupakan langkah awal bagi penyampaian wacana baru dalam melihat dan memahami sekaligus merupakan upaya pendekatan kepada masyarakat, untuk itu proses sosialisasi merupakan gerbang terpenting ketika konsep ini ingin diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Terlebih jika konsep tersebut ingin menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci dalam implementasi kegiatan.

Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, dari membuang menjadikan sampah yang bermanfaat, dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, agar tujuan pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal.

Dari uraian yang telah dijelaskan dapat di lihat bahwa faktor yang lebih dominan menimbulkan hambatan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Kebiasaan pengelolaan sampah yang kurang baik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan. Keseluruhan dari faktor-faktor diatas merupakan bagian dari perilaku, baik perilaku individu, kelompok, maupun masyarakat.

Dalam tahap pengelolaan peran serta masyarakat sangatlah penting. Mengupayakan agar sampah dikelola, dipilah dan diproses tahap awal mulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri (dalam hal ini mayoritas adalah lingkungan rumah tangga). Pada fase awal di tingkat rumah tangga setidaknya diupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah serta dikumpulkan menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur ulang.

Peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah di Desa Cepokomulyo dapat dikatakan kurang. Ini terlihat dari kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih kuatnya kebiasaan untuk membuang sampah begitu saja dan tanpa terlebih dulu memilah-milah sampah organik dan sampah anorganik serta masih sedikitnya kegiatan daur ulang sampah. Dengan kata lain, kegiatan pengolahan sampah dengan metode 3R yang seharusnya sudah dimulai di tingkat rumah tangga masih belum banyak dilakukan.

Di samping itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan, dalam arti masih adanya sampah-sampah yang menumpuk bukan di TPS. Ada persepsi masyarakat yaitu yang paling utama/penting tidak ada sampah didekat mereka tidak ada masalah jika ada ditempat lain. Dalam hal ini dari segi pemerintah juga masih kurang memfasilitasi masyarakat dengan belum tersedianya alat-alat untuk pengomposan.

Untuk menindaklanjuti kebijakan nasional pembangunan bidang persampahan dengan sasaran peningkatan akses pelayanan yang mengarah pada target MDGs, seperti pengurangan volume sampah melalui program 3R,

diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Menteri Pekerjaan Umum RI, 2006). Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja. Sudah saatnya masyarakat sebagai penghasil sampah ikut berpartisipasi dan ikut bertanggung jawab, minimal mengurus sampahnya sendiri. Mengingat keberhasilan program 3R sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai penghasil sampah, maka perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep berbasis masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan TPST serta pengelolaan sampah rumah tangga pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Cepokomulyo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menggambarkan adanya permasalahan-permasalahan yang akan peneliti jadikan bahan acuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat Akademis:
  - a. Output dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan.

- b. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti yang selanjutnya dalam tema yang sama.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi peneliti : untuk menumbuh kembangkan sikap kritis peneliti terhadap upaya yang diterapkan Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan.
- b. Bagi Desa (Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) : output penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih baik.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diawali dengan pembahasan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta menguraikan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat berbagai pendapat para ilmuwan serta teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu berisi tentang Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Desa dan Pengelolaan Sampah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum responden, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang dilakukan di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan interpretasi hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta pengajuan saran yang mungkin dapat dipergunakan Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam pengelolaan sampah yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Istilah Administrasi

Pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dalam Keban (2008:2) menunjukkan variasi batasan tentang "administrasi".

Administrasi, menurut pendapat A. Dunsire, dapat diartikan

“sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik”.

Kedua pengarang ini juga mengutip pendapat Trecker (Donovan dan Jackson, 1991) dalam Keban (2008:2) bahwa: “administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”.

Menurut mereka, kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan secara implisit termasuk kedalam definisi tersebut. Adapun tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan, dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntunan program dan pelayanan, mengamankan sumberdaya keuangan, fasilitas, staff, dan berbagai bentuk

dukungan lainnya, mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi, menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur, dan prinsip-prinsip operasi, mengevaluasi program dan kepegawaian secara berkesinambungan, dan membuat perencanaan serta melakukan penelitian, dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Batasan-batasan tersebut diatas secara langsung menepis anggapan yang ada selama ini bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan atau yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur file, membuat laporan administratif ke pihak atasan, dan sebagainya. Dan agar lebih meyakinkan lagi, dapat dilihat definisi administrasi dalam *The Public Administration Dictionary* (Chandler dan Piano, 1988) dalam Yeremias (2008:3) sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan.

## 2. Istilah Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut menurut Chandler dan Piano (1988:29-30) dalam Keban (2008:3), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang

ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Definisi administrasi negara menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2003:32) adalah : “Administrasi Negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”. Sedangkan Pfiffner dan Presthus dalam Handyaningrat (1980:3), mengemukakan bahwa : “Administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara”. Definisi Administrasi Negara menurut Siagian (1990:8), mengemukakan bahwa: “Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dalam suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat suatu negara merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Masalah-masalah yang timbul di masyarakat sangat beragam, hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menyelesaikannya. Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat.

Istilah administrasi publik juga seringkali diganti oleh para ahli ilmu politik dengan "birokrasi" (Kettl, 1993) dalam Keban (2008:4). Variasi istilah ini lebih populer karena lebih mudah dipahami dan diamati secara nyata oleh orang awam dari pada istilah administrasi publik. Selain itu, variasi makna ini mungkin juga berasal dari pengertian "publik" itu sendiri. "Publik" memang dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu tetapi "publik" juga menunjuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan "lembaga pemerintah".

Variasi makna administrasi publik dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata "administrasi publik" itu sendiri. Ada yang menterjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, ada yang *administration for public* atau adminisrasi untuk publik, bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by public* atau administrasi oleh publik. Variasi terjemahan tersebut menarik karena dapat menunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi publik mulai dari administrasi publik yang berparadigma paling tidak demokratis sampai yang paling demokratis, atau dari yang tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sampai ke yang benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena

diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

Kemudian istilah *administration for public* menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama diatas, yaitu pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya, istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada "*empowerment*" yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

Tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi "administrasi publik" karena

administrasi publik merupakan konsep yang kompleks. Fesler (1980) dalam Keban (2008:5), misalnya, mengemukakan bahwa administrasi publik adalah *the administration of governmental affairs*. Administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Hal yang serupa diungkapkan oleh Stillman II (1991) dalam Keban (2008:5), yaitu bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi bahkan sulit untuk disepakati.

Dalam kaitannya dengan pendefinisian administrasi publik, Shafritz dan Russel (1997:5-41) dalam Keban (2008:6) berpendapat bahwa adalah sulit memberikan satu definisi administrasi publik yang dapat diterima semua pihak. Karena itu kedua pengarang ini memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu kategori politik, legal atau hukum, manajerial, dan mata pencaharian.

Definisi berdasarkan kategori politik melihat administrasi publik sebagai "*what government does*" (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.

Sedangkan definisi berdasarkan kategori legal atau hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (*law in action*), sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa atau "raja" kepada rakyatnya, dan sebagai bentuk "pengambilan paksa" terhadap pihak-

pihak yang kaya untuk dibagikan ke kalangan miskin, dimana pihak-pihak kaya yang merasa dirugikan harus tunduk dan mentaatinya.

Dilihat dari kategori manajerial, administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain), sebagai *mickey mouse* yang dalam prakteknya merupakan bentuk "akal-akalan" untuk menghasilkan sesuatu dengan anggaran yang besar tetapi dengan hasil yang kecil, dan sebagai suatu seni dan bukan ilmu.

Dan dilihat dari kategori mata pencaharian (*occupational definitions*), administrasi publik merupakan suatu bentuk profesi mulai dari tukang sapu sampai dokter ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrator publik, sebagai upaya yang cerdas untuk memperebutkan program dan proyek yang dapat didanai pemerintah, sebagai suatu penerapan idealisme dimana orang-orang yang berkerja ingin mewujudkan impian atau idealismenya, dan sebagai suatu bidang akademik yang akan terus memusatkan perhatiannya terhadap seni dan ilmu manajemen untuk diterapkan di sektor publik.

Dari semua batasan ini, ada beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakekat administrasi publik yaitu:

1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif;
2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik;

3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah;
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta;
5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods* dan *services*;
6. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis.

Dewasa ini administrasi publik dianggap sebagai manajemen. L.F.Keller (2003:997) dalam Keban (2008:8) melihat administrasi publik sebagai *system of management for complex public administration*. Owen Hughes (2004:23) dalam Keban (2008:8) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi akademik tentang sektor publik. Dalam hubungan dengan pengertian ini, administrasi publik dipandang sebagai manajemen pengembangan teknologi modern menuju *modern governance*. Definisi ini dipengaruhi oleh gerakan reformasi administrasi publik yang dikenal dengan nama New Public Management (NPM). Dan akhir-akhir ini, administrasi publik, menurut C.T.Goodsell (2006) dalam Keban (2008:8), dilihat sebagai upaya menghasilkan *integrated public governance* dimana semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik diintegrasikan berdasarkan nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keterandalan, transparansi, keterlibatan dan integritas agar dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

### 3. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu upaya masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu. Menurut Tjokroamidjodjo (1980:59) dikemukakan pula pengertian pembangunan yaitu “Pembangunan adalah suatu proses dinamis, pembangunan adalah usaha kearah tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pembangunan juga merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan untuk mewujudkan ide-ide dan realita yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarahnya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ndraha (1982:53), Pembangunan adalah

“segala macam bentuk perubahan sosial yaitu perubahan sosial yang dikendalikan. Perubahan sosial yang dikendalikan itu diharapkan tidak hanya mencapai tingkat kelompok, melainkan juga tingkat anggota masyarakat. Hakekat dari Pembangunan adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki”.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berarti upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia dalam posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis, sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan.

Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004:21) yang menyimpulkan beberapa definisi pembangunan sebagai citra pembangunan

dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *trancendental*, sebagai *metadisciplinar*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi yaitu *phenomenon the ideology of developmentalism*.
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara semakin meningkat.
6. Pembangunan menjadi *culture specific*, *situation specific* dan *time specific*.

Di negara yang sedang berkembang dalam melakukan pembangunan hingga saat ini terdapat tiga jenis strategi yang digunakan yaitu pertama, strategi pertumbuhan (*growth strategy*) didasarkan pada asumsi efek tetesan ke bawah atau *trickle down effect*, pelaksanaan pembangunan di negara sedang berkembang penekanannya pada pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan konsep pertumbuhan dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan yang sangat pesat namun belum ada aspek pemerataan. Kedua, strategi kesejahteraan (*welfare strategy*) yang bertitik tolak pada asumsi bahwa merekalah (pemerintah) yang menentukan apa yang perlu bagi masyarakat dan mempunyai dana untuk tujuan itu serta penerapan pembangunan kesejahteraan cenderung pelaksanaannya bersifat sentralistik (*top down*), sehingga hubungan ketergantungan antara rakyat dengan proyek-proyek pembangunan yang pada akhirnya mengakibatkan

tidak adanya pro aktif dari masyarakat karena tidak adanya partisipasi yang nyata. Ketiga, strategi responsif atau partisipatif. Esensi dari strategi responsif adalah keterlibatan masyarakat membuat keputusan-keputusan dalam setiap tahap aktivitas, yaitu materi dari persiapan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bangsa, negara dan pemerintah secara sadar dan terencana untuk menuju proses perubahan untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih baik.

#### **4. Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan menurut Siagian (2005:83) merupakan bagian dari administrasi Negara. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu Negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita Negara tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman.

Selanjutnya Siagian menyebutkan definisi dari administrasi pembangunan yaitu sebagai usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-*

*building*). Selain itu, Tjokroamidjojo dalam Siagian (2005:95) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dari definisi tersebut dapat diketahui tentang ide pokok dari administrasi pembangunan yaitu: (1) adanya suatu proses yang terus menerus. (2) usaha yang dilakukan dengan perencanaan. (3) orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya. (4) memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. (5) memiliki tujuan utama untuk membina bangsa. Kesimpulannya, administrasi pembangunan adalah studi tentang system Administrasi Negara dalam negara yang sedang membangun yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dan menunjuk pada peran pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Salah satu fungsi dalam ruang lingkup administrasi pembangunan yaitu administrasi bagi pembangunan. Pada administrasi pada pembangunan tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi Negara dalam pembangunan, atau dengan kata lain administrasi administrasi dari proses pembangunan, yang membedakan administrasi Negara dalam pengertian umum. Administrasi dalam pembangunan memiliki dua fungsi, yaitu perumusan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif. Administrasi bagi pembangunan lebih berorientasi untuk

mendukung usaha-usaha pembangunan Negara yang belum maju. Beberapa langkah yang dilakukan dalam administrasi bagi pembangunan adalah:

a. Perencanaan

Definisi sederhana diungkapkan oleh Handoko (1997:78) yakni perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

b. Pengerahan sumber daya

Dengan perencanaan yang telah tersusun, langkah selanjutnya adalah memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup, yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Sumber daya pembangunan tersebut intinya berupa modal, sumber daya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan.

c. Menggerakkan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi menurut Santoso Sastropetro (1986:39) bahwa “partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”.

d. Koordinasi

Untuk lebih memperlancar pembangunan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, maka diperlukan kebijakan desentralisasi. Dan dalam konteks ini, maka koordinasi adalah jawaban dan kebutuhan desentralisasi. Menurut Handoko (1997:95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah pada organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

e. Pengawasan dan evaluasi pembangunan

Mockhler dalam Handoko (1997:360-361) mengemukakan definisi pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, memandang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya digunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki program tersebut maupun program selanjutnya.

### a) Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat Menurut Widjaja (2004 : 169) adalah :

“Upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya”.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki 4 akses yaitu :

- 1) Akses terhadap sumber daya
- 2) Akses terhadap teknologi
- 3) Akses terhadap pasar
- 4) Akses terhadap sumber pembiayaan

Untuk memberdayakan masyarakat, perlu beberapa hal yang perlu ditawarkan agar masyarakat mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan sebagai subjek dalam turut serta melakukan pembangunan. Ada beberapa strategi yang ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat menurut Suryono (2010:262) :

“Ada empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain: (1) memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek. (2) mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif dan efisien. (3) mobilisasi

sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya. (4) memaksimalkan peran pemerintah (khususnya pemerintah kelurahan dan desa) dalam memfasilitasi dan mengatur pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata dari pemerintah lalu turun ke masyarakat, melainkan adanya interaksi dari kedua belah pihak tersebut. Seperti konsep pemberdayaan menurut Walter Stohr and Fraser Taylor dalam Sumodiningrat (2007:29), “merupakan hasil interaksi di tingkat ideologis maupun praktis. Di tingkat ideologis, konsep ini merupakan hasil interaksi antara konsep *top down* dan *bottom up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*”.

Mencermati upaya pemberdayaan masyarakat maka pemerintah beserta pranatanya perlu memperhatikan hal-hal yang bisa mendukung dan menghambat jalanya proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Dengan kata lain gerakan pemberdayaan masyarakat mau tidak mau membuat pemerintah memikirkan kebijakan strategis agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, sehingga terdapat sinkronisasi dan harmonisasi hubungan yang terjalin antara pemerintah dan mencerahkan masyarakat.

Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dari bidang ekonomi atau administrasi, menempatkan masyarakat pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan dengan kata lain masyarakat tidak hanya menjadi obyek tetapi juga sebagai subjek.

Menurut Sumodiningrat ( 1997 : 164 ) terdapat dua strategi pembangunan yaitu

“ pertama, memberi peluang agar sektor dan masyarakat modern bisa maju dan kedua, memberikan perhatian lebih banyak kepada lapisan masyarakat yang masih tertinggal. Strategi kedua inilah yang perlu dikembangkan yang pada dasarnya bagaimana masyarakat papan bawah dapat dibantu untuk lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional”.

Berangkat dari pengertian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali dijadikan indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

#### **b) Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan**

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, memberikan keyakinan bagi masyarakat Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai, bila

didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Oleh sebab itu dalam proses pembangunan, factor lingkungan perlu diutamakan untuk menjamin kesejahteraan dimasa akan datang. Menurut Sugandhy (2007:4) :

“Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang”.

UUD Tahun 1945 pasal 33 juga menyebutkan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut secara berkelanjutan harus bisa dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

## **B. Desa**

### **1. Pengertian pemerintah desa**

Pengertian pemerintah desa secara umum menurut Widjaja ( 2004 : 65) adalah : “Pemerintah Desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah di bawah kecamatan yang memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sitem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Sedangkan menurut Sabtoni ( 2005 : 28 ) menyatakan jika pemerintah desa merupakan :

“organisasi pemerintah yang terendah merupakan *Grass root* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki empat tipe kewenangan, yaitu : pertama, kewenangan generik ( asli ) sering disebut hak dan kewajiban asal usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum ( self governing community ). Kedua, kewenangan devolutif merupakan kewenangan yang melekat pada desa karena posisinya ditegaskan sebagai pemerintahan lokal ( local self government ). Ketiga, kewenangan distributif, yaitu kewenangan bidang pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah kepada desa. Keempat, kewenangan “negatif” yaitu kewenangan desa menolak tugas pembantuan dari pemerintah jika tidak disertai oleh pendukungnya atau jika tugas tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat”.

Menurut beberapa pengertian diatas Pemerintah Desa adalah simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

## 2. Otonomi Desa

Menurut Sabtoni (2005 : 14) menyatakan bahwa Otonomi desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan pemaknaan standar yang formalis dan tidak clear dalam kehidupan

masyarakat desa. Sedangkan menurut Rozaki (2005 : 16) Otonomi desa merupakan kemandirian yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerinthan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Berangkat dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi, desa memiliki kewenangan hak dan tanggung jawab untu mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip kewenangan asli dan kewenangan distributif yang diberikan oleh pemerintah pada level yang lebih tinggi. Dengan pelaksanaan otonomi desa tersebut maka desa harus mampu mengurangi ketergantungannya kepada Pemerintah baik pusat maupun kabupaten / Kota. Esensi dari otonomi desa adalah kemandirian yang tercipta dari kemandirian masyarakat ssetempat yang ditopang dengan berbagai sumber yang ada di Desa serta sumber yang dialokasikan oleh pemerintah diatasnya.

### **3. Prinsip dan Tujuan Otonomi Desa**

Pada Dasarnya otonomi desa bukanlah sekedar swadaya yang dimiliki oleh masyarakat desa saja, tetapi lebih pada proses pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil kepada desa. Dalam hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sabtoni (2005 : 14) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi desa haruslah memegang prinsip Kebebasan (Discretionary), Kekebalan (Imunitty) dan Kemampuan (Capacity) dalam pengambilan keputusan dan menggunakan kewenangan untuk mengelola

sumber daya lokal. Dari ketiganya tersebut akan membuat posisi desa lebih kuat, khususnya dalam pelaksanaan otonomi desa. Kekebalan dan Kekuasaan merupakan isu yang harus ada, serta berasal dari pemerintah supra desa yang di desentralisasi kepada desa, sedangkan kemampuan merupakan sesuatu yang melekat pada desa.

Untuk membuat kemandirian (otonomi) dalam masyarakat desa, dibutuhkan dua daya dukung, Pertama desentralisasi dari negara yang membagi kekuasaan, kewenangan keuangan kepercayaan dan tanggung jawab kepada desa. Kedua, basis lokal yang tumbuh di dalam desa (Swadaya, modal sosial, adat dan pranata lokal, kapasitas serta sumber ekonomi). Agar desentralisasi dan otonomi desa mempunyai makna bagi seluruh entitas desa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Menurut Sabtoni (2005 : 14) prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membuat struktur pemerintahan non-hierarkis dengan cara membagi kewenangan yang proporsional antara pusat, daerah dan desa serta mengembangkan multy level governance.
- b. Membuat local self government di desa yang berbasis pada Self-Governing community.
- c. Menghargai keunikan dan keragaman basis sosio kultural local.
- d. Membuat subsidiarity (pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan secara lokal) untuk desa.
- e. Supervisi, fasilitasi dan Capacity building dari supra desa.
- f. Ditopang dengan demokrasi, akuntabilitas, transparansi, responsifitas dan wadah representatif
- g. Berbasis pada partisipasi masyarakat desa.

Kemandirian desa merupakan cita-cita ideal jangka panjang  
Desentralisasi dan Otonomi Desa untuk mewujudkan dari proses

pelaksanaann Otonomi Desa. Menurut Sabtoni (2005 : 15) tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan Otonomi Desa adalah :

- a. Mendekatkan perencanaan pembangunan kepada masyarakat.
- b. Memperbaiki pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.
- c. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- d. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa.
- e. Menggairahkan ekonomi lokal dan kehidupan masyarakat desa.
- f. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.
- g. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
- h. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat.
- i. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Sedangkan menurut Rozaki (2004 : 15) tujuan dari Otonomi Desa adalah semakin transparansinya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa.

Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa dengan digulirkannya Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Pemerintah Dearah maka kehidupan masyarakat desa lebih terangkat, khususnya dalam hal perangkat demokrasi dan Otonomi Desa. Dengan keberadaan otonomi di Tingkat desa berarti pemerintah berupaya mewujudkan kemandirian di tingkat desa dan mengurangi segala intervensi dari pemerintah pusat. Selain itu dengan Otonomi di tingkat desa berarti penyeragaman desa seperti yang ada di masa Orde Baru dapat dihilangkan pada kehidupan ranah desa.

### C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan dan material yang diperlukan (Wibisono, 1989:41).

Partisipasi masyarakat merupakan lingkungan masyarakat yang didalamnya terdapat interaksi individu dengan individu yang lain (Walgito, 1999:22), dimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, hal tersebut dapat dibedakan antara lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Dimana dalam partisipasi di lingkungan sosial primer terdapat hubungan yang erat antara individu satu dengan yang lain, individu satu saling kenal dengan individu yang lain.

Seperti yang dikemukakan oleh Walgito (1999), partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan

pembangunan akan kurang berhasil. Menurut Bandura (1977) hubungan antara individu dan lingkungannya dan individu dengan dirinya sendiri memberikan formulasi bahwa perilaku seseorang akan dapat mempengaruhi lingkungannya, tetapi juga dapat mempengaruhi individu yang bersangkutan.

### 1. Definisi Partisipasi

Secara etimologis partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Menurut Sastropoetro (1986 : 39) partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan , disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut White dikutip oleh Sastropoetro (1986 : 52) partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan komunitas secara aktif dalam pengambilan keputusan / pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Pada hakekatnya partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991 : 154-155) sebagai berikut :

*pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih

mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Adapun prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun *Department for International Development* (DFID) dikutip oleh Sumampouw (2004 : 106-107) adalah :

- a. Cakupan  
Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*)  
Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi  
Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*)  
Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*)  
Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*)  
Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama  
Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Dari pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Harapan yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

## 2. Jenis Partisipasi

Menurut Keith Davis dikutip oleh Sastropoetro (1986 : 16) jenis partisipasi adalah sebagai berikut :

- a. Pikiran
- b. Tenaga
- c. Pikiran dan Tenaga
- d. Keahlian
- e. Barang
- f. Uang

Sedangkan Menurut Ndraha (1982 : 27) mengemukakan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

- a. Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi
- b. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak maupun yang bermaksud menerima dengan syarat.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembanguana
- e. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan

### **3. Tahapan dan Bentuk Partisipasi**

Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan operasional program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran, dan material yang diperlukan (Wibisono, 1989:41). Sementara dalam Parfi (2007:27) Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsetaan, keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan dari partisipasi masyarakat untuk menghasilkan ide dan persepsi yang berguna untuk masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Canter dalam Sastropetro, 1990:4). Sebab dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak suatu kegiatan dari cara pengambilan keputusan, kebutuhan dari pengharapan kelompok masyarakat, dan kelompok masyarakat itu menuangkannya kedalam suatu konsep. Reaksi dari pandangan masyarakat itu akan membantu masyarakat itu sendiri dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas, arah dan kepentingan yang positif dari berbagai faktor.

Partisipasi haruslah terbuka untuk umum, partisipasi akan mempengaruhi kredibilitas suatu badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang ada akhinya akan memaksa tanggung jawab dari badan negara atas kegiatan yang dilakukan (Sastropetro, 1990). Ada tiga hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- (1) Keadaan sosial masyarakat
- (2) Kegiatan program pembangunan
- (3) Keadaan alam sekitar.

Keadaan sosial masyarakat meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan, dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan keadaan alam sekitar mencakup faktor fisik atau keadaan geografi daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut. Faktor-faktor pokok yang mempengaruhi anggota masyarakat turut berpartisipasi adalah: (i) adanya kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi, (ii) kemampuan anggota untuk berpartisipasi, dan (iii) kemauan anggota untuk berpartisipasi (Sastroputro, 1988).

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas maka tahapan dan bentuk partisipasi dibatasi sebagai berikut :

#### 1. Partisipasi pada tahap perencanaan

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan meliputi berbagai hal sebagaimana dikemukakan oleh Sumoharjo (1984:54) yaitu: Keikutsertaan anggota masyarakat dalam usaha merealisasikan aspirasinya dengan jalan menyumbangkan pikirannya, inisiatif dan kreatifitasnya dalam bentuk pemikirannya, usul, saran-saran dalam rapat resmi dan tidak resmi.

Partisipasi masyarakat dalam mengemukakan tenaga dan pikiran dalam hubungannya dengan pembangunan desa diwujudkan dalam keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam memberikan sumbangan yang berupa tenaga dan pikiran yang berkaitan dengan pembangunan di desanya. Sumbangan tenaga atau pikiran ini dapat disalurkan melalui

kegiatan kerja bakti dan rapat atau musyawarah yang membahas tentang pembangunan desa. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang besar, maka baiknya semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah pembahasan tentang pembangunan, sehingga seluruh aspirasi dan kehendak masyarakat dapat ditampung dan dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih dan merencanakan pembangunan untuk masa yang akan datang. Tahap perencanaan sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih efektif, efisien dan terarah. Diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan sesuai serta menyentuh kepentingan-kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

## 2. Partisipasi pada tahap pelaksanaan

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada bagaimana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah direncanakan. Dengan demikian pengukurannya adalah bagaimana masyarakat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan/program. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat yaitu:

### a. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Bentuk partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh masyarakat, warga ikut

berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desanya dengan menyumbangkan tenaga mereka.

b. Partisipasi dalam bentuk sumbangan uang atau materiil

Partisipasi ini diwujudkan dengan memberikan uang atau materi yang merupakan sumbangan dari warga desa. Sumbangan ini dapat berupa uang, bahan baku atau makanan. Partisipasi seperti ini bersifat sukarela disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warga desa.

3. Partisipasi pada tahap pemanfaatan/menikmati hasil

Tahap menikmati hasil merupakan tahap yang menentukan dalam partisipasi. Semakin tinggi responden mendapatkan hasil dari kegiatan yang dilakukan, maka semakin berhasil kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu tahap menikmati hasil dari partisipasi dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat kegiatan dirasakan, maka semakin berhasil kegiatan tersebut mengenai sasaran.

4. Partisipasi pada tahap pengawasan

Wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi misalnya masyarakat diharapkan ikut serta dalam mengawasi, menjaga dan

memelihara semua hasil pembangunan desanya dengan sebaik-baiknya bukan sebaliknya merusak hasil pembangunan. Semua hasil pembangunan hendaknya dapat dimanfaatkan oleh semua warga desa dan diharapkan tidak dimanfaatkan saja tetapi juga ikut menjaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

#### **D. Pengelolaan Sampah**

Dalam Undang-Undang No.18 tentang pengelolaan sampah menyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya menurut istilah lingkungan untuk manajemen, Ecolink dalam Basriyanta (2007:17), "Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Dengan demikian sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan masyarakat yang berwujud padat baik berupa sampah basah (organik) maupun sampah kering (anorganik) yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi, sehingga dibuang ke lingkungan oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sedangkan menurut Hadiwiyoto (1983:12) ciri-ciri sampah adalah sebagai berikut:

- a. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya.
- b. Dari sosial ekonomis, sampah adalah bahan yang sudah tidak ada harganya.

- c. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

Dari ciri-ciri tersebut dapat diberikan batasan secara definitif sebagai berikut: sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan gangguan kelestarian.

### **1. Jenis-Jenis Sampah**

Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang jenisnya tergantung dari aktivitasnya. Setiap jenis sampah memiliki metode pengolahan yang berbeda. Oleh karena itu, kunci dari pengelolaan sampah adalah pemilahan, atau pemisahan antara jenis sampah yang satu dengan yang lain. Berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya jenis sampah secara umum menurut data Dinas Pekerjaan Umum dalam Kastaman (2007:72) dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu:

- a. Sampah Organik

Yaitu sampah yang susunannya terdiri atas bahan organik yang mempunyai sifat yang mudah membusuk jika dibiarkan dalam keadaan basah. Sampah organik atau sering disebut sampah basah adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contohnya adalah

sayuran, daging, ikan, nasi, dan potongan rumput/daun/ranting dari kebun. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari sampah organik setiap harinya. Pembusukan sampah organik terjadi karena proses biokimia akibat penguraian materi organik sampah itu sendiri oleh mikroorganisme (makhluk hidup yang sangat kecil) dengan dukungan faktor lain yang terdapat di lingkungan. Metode pengolahan sampah organik yang paling tepat tentunya adalah melalui pembusukan yang dikendalikan, yang dikenal dengan pengomposan atau komposting.

#### b. Sampah Non Organik

Sampah Non Organik atau sampah yang tidak mudah busuk atau sampah kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari industri. Contohnya adalah gelas, plastik, tas plastik, kaleng dan logam. Sebagian sampah non-organik tidak dapat diuraikan oleh alam sama sekali, dan sebagian lain dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Mengolah sampah non organik erat hubungannya dengan penghematan sumber daya alam yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut dan pengurangan polusi akibat proses produksinya di dalam pabrik.

Sedangkan sampah berdasarkan sumbernya terdapat empat jenis sampah menurut Gumbira (1977:12) :

a. Sampah Domestik

Sampah ini berasal dari lingkungan perumahan atau pemukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah pedesaan umumnya lebih berupa bahan organik sisa pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.

b. Sampah Komersial

Yang dimaksud sampah komersial tidaklah berarti sampah mempunyai nilai ekonomi untuk dapat diperdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang dihasilkan dari lingkungan perdagangan seperti toko, warung, restoran, swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dapat berupa organik maupun anorganik.

c. Sampah Industri

Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat bergantung pada kegiatan industri itu sendiri.

d. Sampah Alami dan Lainnya

Jenis sampah ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga berupa sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat rekreasi, kendaraan umum dll.

Partisipasi masyarakat yang paling banyak terjadi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan akan dilakukan proses pengelolaan sampah yang menurut Kastaman (2007:21) terdiri atas beberapa tahapan proses, antara lain pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan serta pembuangan akhir.

a. **Pewadahan Sampah**

Pewadahan sampah adalah awal proses dari pengelolaan sampah yang merupakan usaha menempatkan sampah dalam suatu wadah atau tempat agar tidak berserakan, mencemari lingkungan dan estetika. Alatnya dinamakan tempat sampah. Pewadahan sampah digolongkan menjadi 2, yaitu:

1) **Pewadahan Individual**

Pengadaan wadah sampah ini dilakukan oleh masing-masing individu pemilik bangunan atau rumah tersebut. Umumnya diterapkan di daerah komersial, perkantoran, dan pemukiman yang teratur.

2) **Pewadahan Komunal**

Pengadaan wadah sampah komunal umumnya diterapkan di daerah pemukiman yang tidak teratur (dari segi bangunan dan jalan), pemukiman yang masih jarang penduduknya, dan di pasar dengan ukuran bak sampah yang besar.

b. Pengumpulan Sampah

Sistem pengumpulan sampah untuk daerah perkotaan dilakukan oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari Pemerintah Daerah (Pemda), petugas dari lingkungan masyarakat setempat ataupun dari pihak swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah. Sampah yang dikumpulkan kemudian dipersiapkan untuk proses pemindahan ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan atau pembuangan akhir.

Sistem pengumpulan dapat dilaksanakan dengan cara:

i. Pengumpulan Individual (door to door), yaitu:

Pengumpulan sampah dari rumah dengan alat angkut jarak pendek (misalnya truk atau gerobak sampah) untuk diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah sementara) terdekat.

ii. Pengumpulan Komunal, yaitu:

Pengumpulan sampah dari beberapa rumah yang dilakukan pada suatu titik pengumpulan. Pola komunal ini dirasakan sangat tepat untuk daerah pemukiman yang penduduknya memiliki penghasilan menengah ke bawah atau pada daerah pemukiman yang tidak teratur, dimana kondisi jalannya tidak dapat dilalui oleh alat pengumpul sampah (truk atau gerobak sampah).

c. Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah berdasarkan SNI 3242-2008 adalah memindahkan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dapat dipindahkan secara langsung atau melalui tempat penampungan sampah sementara (TPS). Proses pemindahan sampah dilakukan di TPS terpadu dan lokasi wadah sampah komunal ataupun ke kontainer terdekat dengan sumber sampah.

d. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah berkaitan dengan kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir. Menurut SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di permukiman pengangkutan sampah residu dari TPS/TPS Terpadu ke TPA dilakukan bila container telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan yang telah dikonfirmasi dengan pengelola sampah kota.

e. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah adalah upaya yang sangat penting untuk mengurangi volume sampah dan mengubah sampah menjadi material yang tidak berbahaya. Pengolahan dapat dilakukan di sumber, di TPS, maupun di TPA. Prinsipnya adalah dilakukan setelah pemilahan sampah untuk digunakan kembali.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Di dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah dan ruang lingkupnya, maka perlu terlebih dahulu menentukan langkah-langkah dalam metode penelitian yang dipergunakan agar gejala penelitian ini dapat diungkapkan, dirumuskan secara efektif, rasional dan sistematis.

Dengan demikian karena membahas penekanan pada fenomena tertentu, dengan menggambarkan atau mendeskripsikan apa adanya, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan dan Taylor dikutip oleh Moleong (2002 : 3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa alat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sesuai dengan alur pemikiran dalam tujuan penelitian bahwa penelitian ini ingin menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai upaya Pemerintah Kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Maka pendekatan penelitian ini termasuk jenis pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara cermat terhadap fenomena tertentu yang tengah

terjadi dan berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Oleh sebab itu, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menuliskan kejadian pada saat penelitian dilaksanakan kemudian dianalisa dan diinterpretasikan.

## **B. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian menjadi hal yang sangat penting sebelum penelitian dilaksanakan. Oleh karena itu Moleong (2000 : 62-63), menjelaskan ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus, yaitu :

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi inkuiri atau dengan adanya satu fokus, tempat penelitian menjadi lebih layak.

Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (inclusion-exclusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Dari pengertian diatas, maka sangat jelas bahwa fokus penelitian merupakan pokok permasalahan awal yang ditetapkan untuk diteliti. Penetapan fokus penelitian akan memudahkan dalam pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan lokasi penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan sampah dalam tahap pelaksanaan meliputi:
  - a. Pewadahan
  - b. Pengumpulan
  - c. Pemindahan
  - d. Pengangkutan
  - e. Pengolahan sampah
2. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
  - a. Partisipasi pada tahap perencanaan
  - b. Partisipasi pada tahap pelaksanaan
    1. Partisipasi dalam bentuk tenaga
    2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan uang/materi
  - c. Partisipasi pada tahap pemanfaatan/menikmati hasil
  - d. Partisipasi pada tahap pengawasan

### **C. Lokasi Dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian adalah Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian adalah merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun situs dalam penelitian ini adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu di Desa Cepokomulyo.

Adapun alasan dari peneliti memilih lokasi dan situs penelitian yang disebutkan diatas adalah karena TPST Sumedang Bersatu adalah TPST yang pertama di Kabupaten Malang dan dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat yang diharapkan dapat menghasilkan nilai ekonomis.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam sumber data ini peneliti memanfaatkan orang-orang yang tahu persis dan mengetahui bidang ini ( *key person* ). Adapun data yang dikumpulkan akan dilakukan secara resmi maupun tidak resmi yaitu dengan mendatangi sumber data. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2002 : 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Data primer sangat dibutuhkan dalam penelitian karena merupakan data utama yang penting, yang didapatkan langsung dari sumbernya, serta langsung berhubungan langsung dengan peneliti dan mampu memberikan informasi. Adapun sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu  
Desa Cepokomulyo.

- b. Data sekunder, ialah data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama. Maksudnya yakni data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Untuk data sekunder ini bisa diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, laporan, majalah, surat kabar dan naskah hasil penelitian serta materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Pada intinya, data sekunder ini yang mendukung data primer.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan informasi maupun data-data dengan terjun langsung ke objek yang dijadikan sasaran penelitian baik individu maupun lembaga yang dapat memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara

Dalam proses wawancara ini pengambilan yang digunakan dengan meminta keterangan pada pihak yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung yaitu pada : Sekretaris KSM dan Warga Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi ini perlu dilakukan oleh peneliti sebab dapat mengoptimalkan kemampuan peneliti dalam melihat keadaan fenomena, fakta, kehidupan budaya dari subyek penelitian. Selain itu, observasi ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan wawancara. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mempermudah data-data untuk mempertajam analisis yang berhubungan dengan pokok amatan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui segala peristiwa yang terjadi Dalam lokasi penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data sekunder daerah penelitian, yang berupa: data-data benda tertulis seperti dokumen-dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tema penulisan. Dengan membaca dokumen dan mengadakan pencatatan-pencatatan melalui dokumen yang ada di daerah penelitian maka peneliti dapat mempertajam perasaan untuk meneliti serta memberikan analisa yang lebih akurat.

## F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau teknik yang digunakan sebagai referensi untuk mengumpulkan data guna menunjang segala aktifitas dalam

melakukan penelitian, termasuk dalam memecahkan masalah dan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, instrumen penelitian menjadi hal yang penting dalam suatu penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri

Penelitian kualitatif memiliki salah satu ciri yaitu memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama dalam proses wawancara dan analisa data.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Susunan atau rangkaian pertanyaan yang berguna untuk membatasi dan mengarahkan pada fokus permasalahan penelitian.

3. Instrumen penunjang lainnya

Perangkat penunjang yang meliputi, buku catatan dan alat tulis menulis yang dapat digunakan selama berada di lapangan.

## **G. Metode Analisis Data**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16) bahwa proses menganalisa datanya yakni dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh. Dari pendapat tersebut di atas, maka dalam menganalisa data pada penelitian deskriptif kualitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengedit data, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk diselesaikan berdasarkan reliabilitas dan validitas.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan sumber data masing-masing.
- c. Mereduksi data, yaitu mengurangi bagian data lapangan yang tidak relevan.
- d. Menyajikan data, yaitu mendeskripsikan data hasil observasi, interview/wawancara dan dokumentasi.
- e. Menganalisis dan menginterpretasikan data.
- f. Merumuskan kesimpulan dari penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Kondisi Geografis



Gambar 1: Peta Kabupaten Malang

(Sumber: <http://www.malangkab.go.id/konten-85.html> )

Kabupaten Malang terletak pada  $112^{\circ}17'10,90''$  sampai  $112^{\circ}57'00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ}44'55,11''$  sampai  $8^{\circ}26'35,45''$  Lintang Selatan. Batas-Batas Kabupaten Malang adalah:

- a) Utara : Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto.
- b) Timur : Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang.
- c) Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- d) Selatan : Samudra Indonesia

Kabupaten Malang merupakan Daerah Dataran Tinggi, Wilayah ini dipagari oleh :

- a) Utara : Gunung Anjasmoro (2.277m), Gunung Arjuno (3.399 m)
- b) Timur : Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)
- c) Barat : Gunung Kelud (1.731m)
- d) Selatan : Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut

- a) Daerah Dataran Tinggi
- b) Daerah Perbukitan Kapur
- c) Daerah Lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300m diatas permukaan air laut - dpal)
- d) Daerah Lereng Tengger-Semeru di Bagian Timur (500-3600m dpal)

Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan

Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industry. Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian yang agraris yaitu :

- a) Kali Brantas: Bermata air di Ds. Sumber Brantas, Desa Tulungrejo (Batu), membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah ini berakhir di Bendungan Karangates.
- b) Kali Konto: Mengalir melintasi wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang).
- c) Kali Lesti: Mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting.
- d) Kali Amprong: Mengalir di bagian Timur, wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

(<http://www.malangkab.go.id/konten-85.html>)

#### **b. Kondisi Demografis**

Perkembangan penduduk pada Kabupaten Malang selama bertahun-tahun terakhir mengalami peningkatan dan perubahan yang cukup pesat mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2006 yaitu secara berurutan berjumlah 1.984.061 jiwa, 2.057.477 jiwa, 2.057.680 jiwa, 2.051.692 jiwa, 2.319.361 jiwa dan 2.345.658 jiwa. (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, 2010). Sedangkan berdasarkan hasil registrasi perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2012 sebesar

2.487.120 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,85% per tahun terdiri dari laki-laki 1.247.180 (50,15%) dan perempuan 1.239.940 (49,85%) dengan rata-rata kepadatan 704 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2012 adalah sebesar 3.022.141 jiwa terdiri dari laki-laki 1.513.817 jiwa (50,09%) dan perempuan 1.508.324 jiwa (49,91%).

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan dan metoda penghitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang riil pada saat sensus dan/atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur Tahun 2012

NO.	Kel. Umur	JENIS KELAMIN					
	(Tahun)	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1.	0-4	106.675	4,29	102.437	4,12	209.112	8,41
2.	5-9	97.009	3,90	93.774	3,77	190.803	7,67
3.	10-14	103.930	4,18	99.430	4,00	203.360	8,18
4.	15-19	102.423	4,12	96.891	3,90	199.314	8,01
5.	20-24	95.846	3,85	90.840	3,65	186.686	7,51
6.	25-29	96.476	3,88	94.098	3,78	190.574	7,66
7.	30-34	100.307	4,03	96.631	3,89	196.938	7,92
8.	35-39	95.889	3,86	95.121	3,82	190.010	7,68
9.	40-44	95.154	3,83	95.281	3,83	190.435	7,66
10.	45-49	87.058	3,50	90.016	3,62	177.074	7,12
11.	50-54	76.847	3,09	75.778	3,05	152.625	6,14
12.	55-59	62.023	2,49	58.948	2,37	120.971	4,86
13.	60-64	44.587	1,79	44.883	1,80	89.470	3,60
14.	65-69	33.321	1,34	37.438	1,51	70.759	2,85
15.	70-74	23.569	0,95	29.156	1,17	52.725	2,12
16.	75>	26.066	1,05	39.198	1,58	65.264	2,62
<b>TOTAL</b>		<b>1.247.180</b>	<b>50,15</b>	<b>1.239.940</b>	<b>49,85</b>	<b>2.487.120</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Malang dalam Ichrom (2014)

### c. Kondisi Persampahan

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.534,86 Km<sup>2</sup> atau 353.486 Ha dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa, dan 3.217 rukun warga (RW) serta 14.718 rukun tetangga (RT). (ILLPD dalam Ichrom 2014). Jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2012 adalah sebesar 3.022.141 jiwa. Pada tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah penduduk yang cukup tajam menjadi 3.060.866 jiwa (Capil, 2013). Padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Malang yang ditunjukkan pada data di atas berimplikasi pada tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kabupaten Malang karena tingginya jumlah penduduk tentu berbanding lurus dengan peningkatan produksi sampah. Timbulan sampah di Kabupaten Malang adalah  $\pm 6.397$  m<sup>3</sup>/hari dengan  $\pm 1.580$  m<sup>3</sup>/hari timbulan sampah perkotaan dan  $\pm 4.817$  m<sup>3</sup>/hari dihasilkan di kawasan pedesaan. (arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013).

Pelayanan sampah di Kabupaten Malang ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kegiatan pelayanan sampah didelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. UPTD ini tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Malang yang dibagi ke dalam 7 *cluster*, yakni:

Tabel 2. Wilayah Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas

No	UPTD	Wilayah Layanan
1.	Singosari	Kec. Singosari, Kec. Lawang, Kec. Karangploso, Kec. Dau.
2.	Tumpang	Kec. Pakis, Kec. Tumpang, Kec. Poncokusumo, Kec. Jabung
3.	Turen	Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kec. Ampel Gading, Kec. Tirtoyudo
4.	Bululawang	Kec. Bululawang, Kec. Tajinan, Kec. Gondanglegi, Kec. Pagelaran, Kec. Wajak
5.	Kepanjen	Kec. Kepanjen, Kec. Sumberpucung, Kec. Kromengan, Kec. Wonosari, Kec. Wagir, Kec. Pakisaji, Kec. Ngajum
6.	Pagak	Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec. Bantur, Kec. Kalipare, Kec. Gedangan
7.	Pujon	Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Kasembon

Sumber: *Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013*

UPTD tersebut merupakan pelaksana teknis dalam menangani pelayanan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Pengelolaan sampah yang ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan UPTD hanya mampu melayani pelayanan sampah sebesar 38% atau sekitar  $\pm 603,1 \text{ m}^3/\text{hari}$ . (Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2013)

Minimnya angka volume sampah yang mampu ditangani oleh UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang terkendala oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam menangani pelayanan sampah di wilayah Kabupaten Malang adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah.

Kendala lain yang menghambat optimalisasi pelayanan sampah di Kabupaten Malang yakni masih sedikitnya masyarakat yang berperan aktif dalam penanganan pengelolaan sampah. Banyak dari masyarakat yang masih menggunakan paradigma lama yakni sampah dibiarkan begitu saja tanpa dikelola lebih lanjut karena masyarakat memandang sampah adalah barang sisa yang tidak berguna.

Menanggapi fenomena pengelolaan sampah yang kurang optimal akibat rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Malang menggagas sebuah solusi agar pengelolaan sampah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pengelolaan sampah sehingga kelestarian lingkungan pun terjaga. Salah satu wujudnya adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membuat program wisata edukasi di TPA

Talangagung. Melalui program ini, TPA Talangagung menjadi dikenal secara nasional dan internasional karena menjadi TPA percontohan. Karena program ini pula, TPA Talangagung hampir setiap hari ramai oleh pengunjung dari berbagai tempat dan kalangan untuk melakukan studi banding, penelitian, atau hanya sekedar rekreasi. TPA Talangagung juga membuat Kabupaten Malang mendapat penghargaan Kalpataru dan dikenal sebagai TPA yang ramah lingkungan.

## **2. Pemerintah Kabupaten Malang**

Berdasarkan Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan secara otonom. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, maka dalam kelanjutannya akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan

### **a. VISI**

Pada Tahun 2015. Terwujudnya Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing, atau bisa disebut dengan “MADEP MANTEB”

Penjelasan Visi :

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu : mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu

Masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan :

i. Mandiri:

- a. Kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah daerah yang mungutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang didukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur, dan pelyanan publik.
- b. Kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa *leadership* di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

ii. Agamis:

Dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi.

iii. Demokratis:

Dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan

dalam berfikir, bertindak, mampu pengembalian keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.

iv. Produktif:

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah

v. Maju:

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia

vi. Aman:

Dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

vii. Tertib

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku

viii. Berdaya saing

Dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam lambang Kabupaten Malang yaitu : Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materriil dan spiritual disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komphrensif dari 8 kunci tersebut di atas.

#### **b. MISI**

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian melalui pemebrdayaan masyarakat kalangan wong cilik di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukkan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan kesalehan ritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalehan sosial.
3. Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang berkeadaan dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran.

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan.
5. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang memprasyarakan adanya kemampuan berpikir secara sistematis dan logis.
6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman kan pentingnya kesetaraan gender.
7. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Malang sebagai bagian penting dari upaya peletakan dasar industrialisasi di perdesaan.
8. Mempercepat pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur.
9. Membangun sumber daya manusia yang “Berdaya Saing” tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

<http://www.malangkab.go.id/konten-16.html>

### **3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang**

#### **a. VISI**

Terciptanya tata kelola ruang, bangunan dan lingkungan pemukiman yang berkualitas.

**b. MISI**

1. Menciptakan keserasian tata ruang wilayah melalui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang.
2. Menyediakan dan mengembangkan gedung pemerintah serta prasarana pendukungnya.
3. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pemukiman (air bersih, air limbah domestik, *drainase*, jalan lingkungan, persampahan, RTH, pemakaman) di perdesaan dan perkotaan.
4. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme pelaksanaan tugas.

**c. Tujuan**

Tujuan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terciptanya tata ruang yang berkualitas
2. Menciptakan tata bangunan yang berkualitas.
3. Terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat.
4. Terciptanya sinergitas pengelolaan lingkungan.
5. Mencukupi kebutuhan bangunan pemerintah.
6. Terselenggaranya target dengan baik.

#### **d. Sasaran**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan seluruh ruang yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Malang.
2. Penataan bangunan yang efektif dan mencukupi kebutuhan prasarana atau gedung pemerintah.
3. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana dasar pemukiman.
4. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

#### **e. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang nomor 41 Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu:

1. Bidang Tata Ruang
2. Bidang Tata Bangunan
3. Bidang Pemukiman
4. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Makam

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki:

1. 1 (satu) unit Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK) dan,

2. 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Kebersihan, Pertamanan, Pengawasan, Pengendalian Ruang dan Bangunan yan berada di Singosari, Tumpang, Bululawang, Turen, Pagak, Kepanjen dan Pujon.

#### **f. Sumber Daya Manusia**

Sampai dengan dengan akhir Desember 2012, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang memiliki 358 orang pegawai yang terdiri dari 260 orang PNS atau sebesar (62,31%) dan 98 orang pegawai tidak tetap (PTT) atau sebesar (37,69%). Berdasarkan komposisi penddikan, 18,2% atau 65 orang telah menuntaskan pendidikan perguruan tinggi (D3-S2), sedangkan komposisi terbesar ber-ijazah SMA/SMU sejumlah 131 orang atau sebesar (36,6%), sisanya adalah lulusan SD sebesar (23,5%) dan SMP sebesar (21,8%). Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai dinas pelaksana teknis, didukung oleh Tenaga Teknis sejumlah 70 orang atau sebesar (19,6%) dan tenaga Non-teknis sejumlah 288 orang atau sebesar (80,4%).

Tabel : 3 Komposisi Status Kepegawaian pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2014

	<b>PNS</b>	<b>Kontrak</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Laki-Laki</b>	221	87	308
<b>Perempuan</b>	39	11	50
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>98</b>	<b>358</b>

*Sumber: Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014*

Tabel : 4 Komposisi Kompetensi pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2014

	<b>PNS</b>	<b>Kontrak</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Teknis</b>	59	11	70
<b>Non Teknis</b>	201	87	288
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>98</b>	<b>358</b>

*Sumber: Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014*

Tabel : 5. Komposisi Latar Belakang Pendidikan Pegawai pada  
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2014

	<b>PNS</b>	<b>Kontrak</b>	<b>Sub Total</b>
<b>S2</b>	5	0	5
<b>S1</b>	45	10	55
<b>SM</b>	4	1	5
<b>SMU</b>	105	26	131
<b>SMP</b>	42	42	84
<b>SD</b>	59	19	78
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>98</b>	<b>358</b>

Sumber: Arsip Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2014

Tabel : 6 Komposisi Penempatan Pegawai Dinas Cipta Karya dan  
Tata Ruang 2014

	<b>PNS</b>	<b>Kontrak</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Dinas</b>	76	18	94
<b>UPT Kebakaran</b>	23	6	29
<b>UPTD Singosari</b>	29	14	43
<b>UPTD Tumpang</b>	19	8	27

Sumber: Ciptakarya.malangkab.go.id

#### **4. Gambaran umum Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang**

Dahulu sebelum TPST Sumedang Bersatu dibentuk, sampah menjadi suatu permasalahan lingkungan di Desa Cepokomulyo. Lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sementara terletak pada areal pasar dan sungai. Sehingga seringkali sampah-sampah ini mengganggu pengunjung pasar dan banyak sampah-sampah ini yang terbuang ke sungai. Melihat permasalahan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan seperti ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang meminta agar Kepala Desa Cepokomulyo merelokasi tempat pembuangan sementara tersebut dan mengelola sampah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Kepala Desa Cepokomulyo mengajak lembaga kelompok masyarakat dari Desa Cepokomulyo untuk bersama-sama mengelola sampah di Desa mereka. Pada tahun 2009 akhirnya berdirilah TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) "Sumedang Bersatu". Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Malang Ir. Romdhoni mengatakan, TPST Sumedang Bersatu adalah yang pertama kali di Kabupaten Malang. TPST tersebut bakal dikelola secara mandiri oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cepokomulyo. TPST Sumedang Bersatu memiliki luas areal kurang lebih 1442 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 309 M<sup>2</sup>. Dana pembangunan TPST berasal dari APBN dan APBD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyediakan lahan tempat berdirinya TPST Sumedang Bersatu, bangunan, dan infrastruktur serta alat-alat yang digunakan untuk

menunjang aktivitas pengelolaan dan pengolahan sampah. TPST Sumedang Bersatu ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah di wilayah Desa Cepokomulyo. Kini TPST Sumedang Bersatu ini dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan perwakilan dari masyarakat Desa Cepokomulyo dan menjadi binaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.

Visi dan Misi TPST Sumedang Bersatu di Desa Cepokomulyo adalah sebagai berikut:

Visi: Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan penyehatan lingkungan dan pengelolaan sampah terpadu dan mandiri berbasis masyarakat (komunal).

Misi: Pengembangan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman masyarakat melalui peningkatan kualitas sanitasi dan pengendalian pencemaran sumber daya air dan lingkungan permukiman oleh sampah.

Tujuan:

- a. Meningkatkan pola pengelolaan sampah terpadu dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
- c. Meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan perumahan melalui pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.



Gambar 2: Susunan Pengurus Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu 2015

*Sumber: Arsip TPST Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo, 2014*



Gambar 3: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu



## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 1. Proses pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo

#### a. Pewadahan

Pewadahan sampah adalah awal proses dari pengelolaan sampah yang merupakan usaha menempatkan sampah dalam suatu wadah atau tempat agar tidak berserakan, mencemari lingkungan dan estetika. Sampah diwadahi sehingga memudahkan dalam penanganan berikutnya. Seperti memilah-milah dulu sampah mana yang bisa di daur ulang atau tidak, sampah organik atau sampah anorganik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supriatna selaku sekretaris kelompok swadaya masyarakat Desa Cepokomulyo bahwa

“pewadahan dilakukan dari dalam rumah masing-masing warga sebelum sampah tersebut dikumpulkan di tempat sampah yang disediakan di depan rumah warga. Pewadahan sudah dilakukan di tiap masing-masing warga, tetapi banyak yang langsung membuang atau mewadahi sampah tersebut tanpa memilah-milah dahulu. Ini bisa dilihat di tempat sampah yang telah di sediakan banyak sampah yang tercampur jadi satu, padahal sudah disediakan 2 jenis tempat sampah”. (hasil wawancara 7 juli 2015 jam 14.10 di TPST sumedang bersatu)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat pada tahap ini masih belum memilah sampah, hal ini

dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap sampah dan juga faktor kesibukan dari masing-masing masyarakat.

#### **b. Pengumpulan**

Sistem pengumpulan sampah untuk daerah perkotaan dilakukan oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari Pemerintah Daerah (Pemda), petugas dari lingkungan masyarakat setempat ataupun dari pihak swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah. Sampah yang dikumpulkan kemudian dipersiapkan untuk proses pemindahan ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan atau pembuangan akhir.

Sistem pengumpulan dapat dilaksanakan dengan cara:

##### **i. Pengumpulan Individual (*door to door*), yaitu:**

Pengumpulan sampah dari rumah dengan alat angkut jarak pendek (misalnya truk atau gerobak sampah) untuk diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah sementara) terdekat.

##### **ii. Pengumpulan Komunal, yaitu:**

Pengumpulan sampah dari beberapa rumah yang dilakukan pada suatu titik pengumpulan. Pola komunal ini dirasakan sangat tepat untuk daerah pemukiman yang penduduknya memiliki penghasilan menengah ke bawah atau pada daerah pemukiman yang tidak teratur, dimana kondisi jalannya tidak dapat dilalui oleh alat pengumpul sampah (truk atau gerobak sampah).

### c. Pemindahan

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan sementara. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut (SNI 19-2454-2002). Pemindahan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan. Setelah sampah terkumpul di gerobak sampah yang dibawa petugas, sampah dipindahkan ke tempat pembuangan sementara.

### d. Pengangkutan

Pengangkutan sampah berkaitan dengan kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir. Menurut SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di permukiman pengangkutan sampah residu dari TPS/TPS Terpadu ke TPA dilakukan bila container telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan yang telah dikonfirmasi dengan pengelola sampah kota. Tahap ini dilakukan di TPST setelah melakukan kegiatan Pemilahan sampah mana yang bisa di daur ulang menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis atau menjadi pupuk kompos. Sampah yang tidak bisa di daur ulang akan di angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

### e. Pengolahan

Pengolahan sampah adalah upaya yang sangat penting untuk mengurangi volume sampah dan mengubah sampah menjadi material yang tidak berbahaya. Pengolahan dapat dilakukan di sumber, di TPS, maupun di TPA. Prinsipnya adalah dilakukan setelah pemilahan sampah untuk digunakan kembali. Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman. Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu : *Open Dumping, Sanitary Landfill, Controlled Landfill*.

#### a. *Open Dumping*

Metode open dumping ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang / menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem open dumping menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. *Sanitary Landfill*

Metode pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

c. *Controlled Landfill*

Metode controlled landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

**2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo**

**a. Partisipasi pada tahap perencanaan**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka tahapan perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu

komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap.

Dalam suatu rencana pembangunan biasanya fokus perhatian dalam kegiatan perencanaan lebih intern pada penyusunan program kegiatan. Karena dalam program kegiatan itulah akan terlihat hal-hal yang akan dikerjakan.

Hal penting yang perlu di perhatikan juga adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah di kategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi Non Fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam

memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat diwujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan / rapat, melalui surat / saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supriatna selaku sekretaris KSM menyampaikan bahwa

“...disediakkannya 2 tempat sampah di depan masing-masing rumah merupakan hasil usulan seorang warga yang diikuti warga lainnya supaya sampah basah dan sampah kering tidak bercampur”. (hasil wawancara 7 Juli 2015 jam 13.00 di TPST Sumedang Bersatu)

“...beberapa waktu lalu ada warga yang usul supaya di depan rumah warga dikasih 2 tempat sampah agar tidak bercampur sampah basah dan sampah kering. Saya sendiri mengusulkan supaya kerjabakti di jadwal rutin supaya sampah tidak berkeliaran dan bisa dikelola dengan baik.” (Bapak Jumadi, tokoh masyarakat Desa Cepokomulyo. Hasil wawancara 1 Agustus 2015 jam 16.00 di rumah Bapak Jumadi)

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, masyarakat menyumbangkan ide pemikirannya kepada pemerintah agar di depan rumah masing-masing orang di beri tempat sampah. Tempat sampah ini berjumlah 2 buah agar bisa dibedakan antara sampah kering dan sampah basah atau sampah organik dan sampah anorganik.

Tabel 7. Bentuk sumbangan pikiran dalam pertemuan/rapat desa cepokomulyo tentang pengellaan sampah

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	Memberikan usulan	13	37,1
2.	Memberikan saran	2	5,8
3.	Memberikan kritik	1	2,8
4.	Tidak ada	19	54,3
	Jumlah	35	100

Sumber: hasil analisis, 2014

## b. Partisipasi pada tahap pelaksanaan

Partisipasi ini diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Seluruh warga desa harus dilibatkan keikutsertaannya dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya.

### 1. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut hasil pengamatan kerja bakti atau gotong royong sekali dalam sebulan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti membersihkan saluran air, melakukan kegiatan pewadahan sampah, membersihkan TPST, membuat atau memperbaiki jembatan serta kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supriatna selaku sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mengatakan bahwa:

“masyarakat lebih banyak berpartisipasi pada kegiatan kerjabakti membersihkan sampah di desa karena kerja bakti biasanya dilakukan pada hari libur. Sedangkan untuk pemilahan sampah masih beberapa saja yang berpartisipasi, mungkin dikarenakan kesibukan orang masing-masing.” (hasil wawancara 7 Juli 2015 jam 13.15 di TPST Sumedang Bersatu)

“... mungkin partisipasi dalam bentuk tenaga dilakukan kalau ada kerja bakti pada hari libur. kalau pada hari biasa sudah tidak sempat karena kesibukan kerja masing-masing warga termasuk saya”. (Bapak Gufron, Warga Desa Cepokomulyo. Hasil wawancara 2 Agustus 2015 jam 16.30 di rumah Bapak Gufron)

“...kalau partisipasi dalam bentuk tenaga saya ikut berpartisipasi kalau ada kerja bakti dan saya melakukan pewadahan sampah saya sendiri, tetapi belum sempat melakukan pemilahan sampah”. (Bapak Slamet, Warga Desa Cepokomulyo. Hasil wawancara 2 Agustus 2015 jam 17.00 di Rumah Bapak Slamet)

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan desanya. Dalam proses pengelolaan sampah di Desa

Cepokomulyo, partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah masih sedikit atau kurang optimal. Hal ini dikarenakan oleh tingkat kesibukan dari masing-masing orang. Tetapi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan sampah di desa sudah cukup banyak yang berpartisipasi karena dilakukan pada hari libur.

## **2. Partisipasi dalam bentuk uang/materi**

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah.

Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, berbagai upaya dilakukan termasuk di dalamnya kemampuan perangkat desa dan kelompok swadaya masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat Desa Cepokomulyo dalam bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan. Tetapi dana untuk pengelolaan sampah dan pembangunan serta pemeliharaan TPST Tidak sepenuhnya murni dari swadaya masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriatna

selaku sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cepokomulyo mengatakan bahwa:

“Kami sudah menyampaikan kepada masyarakat, bagi warga masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan dapat membantu dalam bentuk uang, tetapi kami tidak memaksakan. Dana untuk pengelolaan sampah dan pembangunan TPST beserta perlengkapannya tidak hanya dari sumbangan swadaya masyarakat, tetapi kita peroleh dari APBN dan APBD. Jadi dana sebagian besar dari pemerintah”. (hasil wawancara 7 Juli 2015 jam 13.30 di TPST Sumedang Bersatu).

“saya biasanya menyumbang dalam bentuk uang, karena lebih praktis dari pada menyumbang dalam bentuk bahan bangunan, lebih mudah dalam bentuk uang”. (Bapak Gufron, warga Desa Cepokomulyo. Hasil wawancara 2 Agustus 2015 jam 16.40 di rumah Bapak Gufron)

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk materi (barang). Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk uang tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk materi (barang), bahkan ada masyarakat yang menyumbangkan kedua-duanya (uang atau materi). Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Sumbangan materi (barang) biasanya dilakukan secara langsung. Dimana sumbangan materi (barang) tersebut diperuntukkan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan TPST dan perbaikan jalanan.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Cepokomulyo dalam bentuk materi (barang) berada dalam kategori rendah, karena berdasarkan

wawancara langsung dengan responden mengatakan bahwa masyarakat lebih banyak menyumbangkan dalam bentuk uang (dana). Alasan lain yang diungkapkan responden bahwa untuk menyumbang dalam bentuk materi prosedurnya agak dan menyita waktu dan tenaga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriatna selaku sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cepokomulyo bahwa:

“..jarang sekali masyarakat yang memberikan sumbangan dalam bentuk materi. Mereka lebih memilih memberikan uang, karena mereka tidak repot. Namun ada juga yang memang memberikan materi seperti kayu, pasir, batu dan lain-lain...” (hasil wawancara 7 Juli 2015 jam 13.45 di TPST Sumedang Bersatu)

“...dulu saya pernah menyumbang dalam bentuk pasir dan uang. Tetapi sekarang saya hanya berpartisipasi dalam bentuk uang karena lebih mudah”. (Bapak Samsul, Warga Desa Cepokomulyo. Hasil wawancara 2 Agustus 2015 jam 15.00 di rumah Bapak Samsul).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat Desa Cepokomulyo lebih banyak menyumbang dalam bentuk uang dikarenakan lebih mudah dan praktis daripada menyumbang dalam bentuk materi/barang yang lebih menyita tenaga dan waktu.

### **c. Partisipasi pada tahap pemanfaatan/menikmati hasil**

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu diharapkan masyarakat ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan dan pengelolaan sampah di desanya dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya merusak. Semua masyarakat hendaknya dapat

memanfaatkan hasil pengelolaan dan pembangunan yang baik, namun tidak hanya sebatas mememanfaatkannya, tetapi juga ikut menjaga dan memelihara agar dapat dimanfaatkan generasi yang akan datang.

Dalam hal ini masyarakat Desa Cepokomulyo telah memelihara hasil pengelolaan sampah dan pembangunan TPST serta mememanfaatkannya dengan baik. Masyarakat memelihara kebersihan lingkungan dan menyumbangkan uang atau materi sebagai bentuk pemeliharaan TPST. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriatna selaku sekretaris Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Cepokomulyo bahwa:

“partisipasi masyarakat dalam hal ini masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memelihara fasilitas yang dipakai untuk pengelolaan sampah seperti misalnya tempat sampah yang disediakan di depan rumah masing-masing orang. Masyarakat juga memelihara pembangunan TPST dengan menyumbang dalam bentuk uang dan material”. (hasil wawancara 7 Juli 2015 jam 14.00 di TPST Sumedang Bersatu).

“beberapa warga yang kurang mampu biasanya ikut memanfaatkan TPST Sumedang Bersatu dalam kegiatan pemilahan sampah, mereka mencari sampah yang bisa di daur ulang dan mempunyai nilai ekonomis tinggi”. (Bapak Jumadi, tokoh masyarakat setempat. Hasil wawancara 1 Agustus 2015 jam 16.10 di rumah Bapak Jumadi).

“saya dan teman-teman biasanya memilah sampah dan saya ambil sampah yang bisa di daur ulang. Saya biasanya ambil gelas plastik bekas minuman untuk saya daur ulang menjadi tempat tisu. Lumayan untuk nambah penghasilan”. (Ibu Tunik, Warga Desa Cepokomulyo. Hasil wawancara 2 Agustus 2015 jam 14.30 di rumah Ibu Tunik).

Dari uraian yang dijelaskan diatas, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk saling memelihara dan menjaga hasil pengelolaan

sampah dan hasil pembangunan. Dengan begitu kualitas kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah terpadu akan meningkat dan warga juga bisa memanfaatkan hasil dari pengelolaan sampah yang baik.

#### **d. Partisipasi pada tahap pengawasan**

Kegiatan pengawasan atau pemantauan terhadap program sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku petugas dan aparat pembangunan sangat diperlukan. Bapak supriatna selaku sekretaris kelompok swadaya masyarakat mengatakan bahwa:

“...warga biasanya menanyakan kepada kami jika ada petugas yang tidak datang mengambil sampah mereka”. (hasil wawancara 15 Agustus 2015 jam 15.00 di TPST Sumedang Bersatu).

“...saya dan warga disini biasanya melapor kepada petugas kebersihan jika ada sampah liar yang berserakan. (Bapak Jumadi, tokoh masyarakat setempat. (hasil wawancara 15 Agustus 2015 jam 16.00 di TPST Sumedang Bersatu).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah atau petugas untuk mendapatkan

informasi supaya pengelolaan sampah di desa cepokomulyo semakin membaik dengan mengatasi masalah-masalah yang terjadi.



Gambar 4: Pengolahan sampah menjadi pupuk kompos

## C. Pembahasan

### 1. Proses pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo

#### a. Pewadahan

Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara baik di sumbernya, baik individual maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya ditempatkan di muka rumah atau bangunan lainnya, sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di tempat terbuka yang mudah di akses. Ada beberapa tujuan dilakukan pewadahan yaitu : memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari perhatian dari binatang, menghindari air hujan dan menghindari pencampuran sampah. Pewadahan dimulai dengan pemilahan baik individual maupun komunal, dan sebaiknya disesuaikan dengan jenis sampah. Misalnya sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan. Sedangkan sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam dan lain lain. Untuk saat ini yang dilakukan di Desa Cepokomulyo adalah kegiatan pewadahan secara individual. Wadah-wadah individual ini ditempatkan didepan rumah masing-masing. Di masing-masing rumah sudah di siapkan 2 tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik, tetapi masyarakat masih belum melakukan kegiatan pemilahan atau memisahkan sampah berdasarkan jenisnya.

### **b. Pengumpulan**

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir. Pengumpulan sampah dilakukan dari setiap timbulan, dimana timbulan sampah dari masing-masing rumah tangga di kumpulkan di wadah. Di Desa Cepokomulyo kegiatan pengumpulan dan pemindahan dilakukan oleh petugas kebersihan setempat. Sampah yang sudah melalui proses wadah yang dilakukan oleh masing-masing warga di depan rumah akan dikumpulkan oleh petugas dengan membawa gerobak sampah.

### **c. Pemindahan**

Pemindahan sampah merupakan tahapan untuk memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pemrosesan atau ke pembuangan akhir. Di Desa Cepokomulyo pemindahan sampah dilakukan oleh petugas dimana setelah mengumpulkan sampah yang telah di wadah ke dalam gerobak sampah, petugas memindahkan menuju tempat pembuangan sementara.

### **d. Pengangkutan**

Pengangkutan dimaksudkan sebagai kegiatan yang dimulai dari titik pemindahan yaitu TPST untuk diangkut ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA). Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan di Desa Cepokomulyo dilakukan dengan menggunakan truk pengangkut sampah, bak truk bisa digerakkan secara hidrolik sehingga proses bongkar sampah bisa dilakukan secara efektif. Sub sistem ini untuk mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sistem pengangkutan dikatakan berhasil apabila tidak ada lagi sampah yang tercecer. Dalam hal ini kegiatan pengangkutan di TPST Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo sudah cukup baik karena setelah sampah yang terkumpul diangkut ke bak truk sudah tidak ada lagi yang tercecer, tetapi rendahnya jadwal pengangkutan yang dilakukan 2 hari sekali menyebabkan penumpukan sampah di TPST.

#### e. Pengolahan

Kegiatan pengolahan sampah dilakukan karena sampah mempunyai nilai ekonomis jika di kelola dengan baik. Di Desa Cepokomulyo sebelum sampah diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dilakukan tindakan pemilahan oleh petugas dengan dibantu oleh masyarakat untuk memilah sampah mana yang bisa di daur ulang, dibuat kompos dan yang tidak masuk kategori keduanya akan di angkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kegiatan pemilahan ini seharusnya dilakukan sebelum kegiatan pewadahan, tetapi masyarakat tidak melakukannya dengan alasan tidak sempat dan lebih

memilih untuk langsung mewadahi sampahnya. Tidak adanya peralatan pengomposan bagi masing-masing warga juga menjadi alasan mengapa tindakan pemilahan dilakukan di TPST. Sebenarnya banyak sampah yang bisa di daur ulang menjadi barang kerajinan tangan, tetapi masyarakat jarang yang melakukannya dan memilih untuk menjualnya langsung.

## **2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Cepokomulyo**

### **a. Partisipasi pada tahap perencanaan**

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan adalah dalam bentuk sumbangan pikiran atau usulan. Partisipasi dalam bentuk pikiran menurut Hamijoyo (2007:21) adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Partisipasi masyarakat di Desa Cepokomulyo dalam bentuk pikiran sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penyajian data fokus penelitian bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah masyarakat juga ikut berpartisipasi baik berupa tenaga atau pikiran. Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan dengan pengelolaan sampah, diwujudkan dalam bentuk sumbangan ide atau usulan dan saran yang diberikan

masyarakat. Masyarakat Desa Cepokomulyo menyumbangkan ide pemikirannya lewat rapat pertemuan yang diselenggarakan Kelompok Swadaya Masyarakat, dapat berupa usulan, saran maupun kritik.

## **b. Partisipasi pada tahap pelaksanaan**

### **1. Partisipasi dalam bentuk tenaga**

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program (Hamijoyo,2007:21). Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif atau tenaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Masyarakat desa Cepokomulyo sudah sangat baik dalam partisipasi aktif dengan menyumbangkan tenaga mereka. Masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti juga pewadahan sampah masing-masing. Masyarakat juga menyumbangkan tenaga mereka lewat kegiatan pemilahan sampah baik mulai di rumah masing-masing maupun ketika

sampah berada di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sumedang Bersatu.

## 2. Partisipasi dalam bentuk uang/materi

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah. Untuk mengantisipasi fenomena tersebut di atas, berbagai upaya di lakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam menghimpun dana dari pemerintah dan menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan.

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk materi (barang). Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk uang tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk materi (barang), bahkan ada masyarakat yang menyumbangkan kedua-duanya

(uang atau materi). Hal ini didasari karena adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Partisipasi di Desa Cepokomulyo dalam bentuk uang dan materi sudah berjalan cukup baik. Untuk partisipasi dalam bentuk uang, iuran secara rutin untuk pengelolaan sampah sudah dijalankan oleh masyarakat Desa Cepokomulyo walaupun dana yang diperoleh tidak terlalu besar. Dana operasional terbesar untuk pengelolaan sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di dapat dari APBN dan APBD. Beberapa warga masyarakat juga ikut menyumbang dalam bentuk barang material, makanan dan minuman. Tetapi sumbangan dalam bentuk materi ini sangat sedikit dan jarang, karena menurut beberapa warga bisa menyita waktu dan tenaga. Warga lebih suka memberikan sumbangan berupa uang daripada materi.

**c. Partisipasi pada tahap pemanfaatan/menikmati hasil**

Masyarakat diharapkan ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan dan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat Desa Cepokomulyo sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hasil pengelolaan sampah dan kerja bakti di desa. Masyarakat juga sukarela membayar iuran guna membiayai operasional TPST agar berjalan dengan baik. Karena TPST Desa Cepokomulyo hasil dari swadaya masyarakat maka peran dari masyarakat dalam membayar iuran sangat

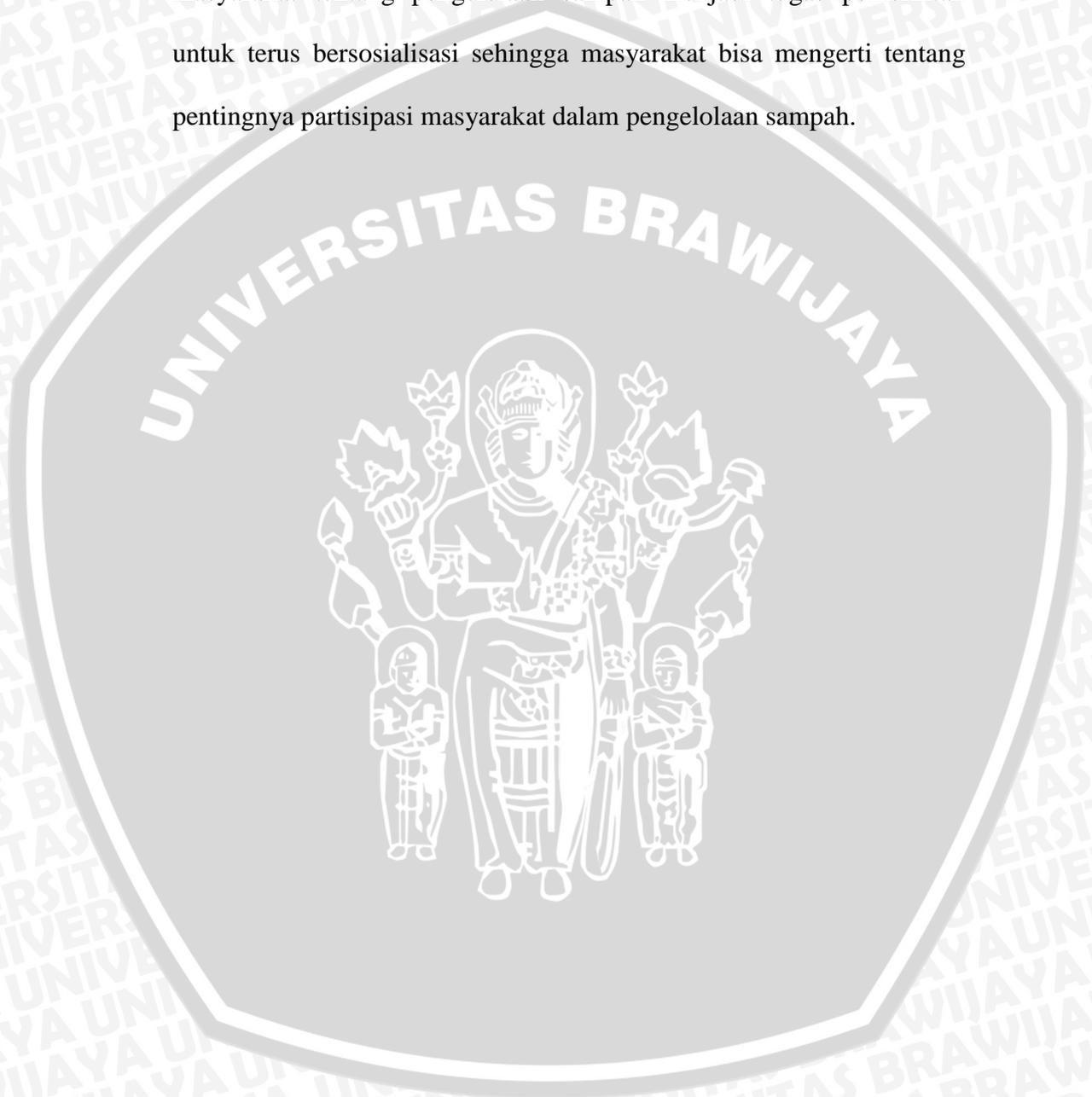
penting agar TPST bisa berjalan dan berkembang. Selain itu hasil dari daur ulang sampah bisa dibuat pupuk kompos dan kerajinan tangan yang bisa dimanfaatkan oleh TPST dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Slamet (1994:89), partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*) yaitu pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa pikiran, tenaga, uang dan materi untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

#### **d. Partisipasi pada tahap pengawasan**

Masyarakat dalam tahap ini diharapkan ikut melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai bentuk partisipasi terhadap hasil program dan juga terhadap petugas sampah dan aparat yang terlibat. Masyarakat desa cepokomulyo biasanya melapor jika ada petugas yang tidak datang atau telat dalam mengambil sampah. Masyarakat juga melapor jika ada sampah liar yang berserakan. Dalam tahap ini partisipasi masyarakat desa cepokomulyo sudah baik karena masyarakat ikut mengawasi terkait pembangunan di desa mereka khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

Kesimpulan dari partisipasi masyarakat di Desa Cepokomulyo adalah masyarakat berpartisipasi pada tahap pewardahan, dimana masyarakat membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan di depan rumah. Tetapi partisipasi masyarakat berhenti sampai disitu,

masyarakat belum melakukan pemilahan sampah, hal ini membuat bercampurnya sampah organik dan anorganik. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah menjadi tugas pemerintah untuk terus bersosialisasi sehingga masyarakat bisa mengerti tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat di Desa Cepokomulyo pada tahap pelaksanaan masih dalam bentuk partisipasi dalam bentuk pewadahan, dimana masyarakat membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan di depan rumah. Masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah. Hal ini menyebabkan sampah organik dan anorganik bercampur.
2. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dilakukan dengan menyumbangkan ide pikiran dan saran. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan uang/materi. Masyarakat juga ikut mengawasi jalannya pengelolaan sampah sebagai bentuk partisipasi pada tahap pengawasan.
3. Masyarakat ikut melakukan kegiatan pewadahan sampah mereka masing-masing dan juga ikut melaksanakan kegiatan kerjabakti dalam membersihkan sampah. Masyarakat juga menyumbangkan ide pemikirannya kepada pemerintah agar di depan rumah masing-masing orang di beri tempat sampah. Tempat sampah ini berjumlah 2 buah agar bisa dibedakan antara sampah kering dan sampah basah atau sampah organik dan sampah anorganik.
4. Partisipasi masyarakat Desa Cepokomulyo lebih banyak menyumbang dalam bentuk uang dikarenakan lebih mudah dan praktis daripada



menyumbang dalam bentuk materi/barang yang lebih menyita tenaga dan waktu.

5. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sudah cukup baik, Masyarakat memelihara kebersihan lingkungan dan menyumbangkan uang atau materi sebagai bentuk pemeliharaan TPST. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk saling memelihara dan menjaga hasil pengelolaan sampah dan hasil pembangunan.
6. Pada tahap pewadahan, masyarakat sudah melakukannya dengan baik. Tetapi hal ini tidak dibarengi dengan tindakan pemilahan sampah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan juga faktor kesibukan masing-masing warga. Pemilahan sampah dilakukan oleh beberapa warga ketika sampah sudah terkumpul di TPST, warga yang berpeghasilan rendah cenderung melakukan pemilahan sampah yang bernilai jual dibandingkan dengan masyarakat yang berpeghasilan cukup.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus bisa menyediakan lahan dan alat pengomposan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam hal pemilahan sampah dan pengomposan.
2. Pemerintah perlu lebih banyak bermusyawarah dengan masyarakat seperti melalui pertemuan / rapat, melalui surat / saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan. Karena masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil bagian dalam

menentukan apa yang akan dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.

3. Pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, sehingga masyarakat lebih mengerti fungsi dan manfaat dari sampah rumah tangga.
4. Pemerintah harus senantiasa mendukung dan sebaiknya memberikan pelatihan agar pengelolaan sampah di TPST Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo terus berjalan dan berkembang. Pemerintah juga bisa memberikan pelatihan ketrampilan terhadap masyarakat dalam mengelola sampah yang masih bisa dipakai untuk dibuat kerajinan sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Bahar. 1986. *Tehnologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Waca Utama Pramesti.
- Bandura, Albert. 1977. *Social Learning Theory*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey
- Basriyanta. 2007. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Conyers, Diana.1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Gumbira, S. 1987. *Bioindustri: Penerapan Teknologi Fermentasi*. Jakarta: PT.Wediyatama Sarana Perkasa.
- Hadiwiyoto, Soewedo.1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Hamijoyo.2007. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno.1980.*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. 1997. *Manajemen dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Kastaman, Roni dan Ade Moetang Kramadibrata. 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu Silarsatu*. Bandung: Humaniora.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J.2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1982. *Pembangunan Desa dan Adminstrasi Desa*. Jakarta : Yayasan Karya Dharma

- \_\_\_\_\_. 1984. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bina Aksara
- Parfi, Khadiyanto. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rozaki, Abdur, dkk.2005.*Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi Desa*. Yogyakarta : Ire Press
- Sabtoni, Anang, dkk.2005.*Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Ire Press
- Sastropoetro, R.A. Santoso.1986.*Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Pembangunan Nasional*. Bandung : alumni.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya*.Jakarta: Haji Masagung.
- Sugandhy, Aca, dkk. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sumampouw, Monique.2004.*Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sumodiningrat, Gunawan.1997.*Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*.Bogor : Bina Rena Pariwisata
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta : Buku Kompas.
- Sumoharjo, V. 1984. *Pembangunan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Walgito, Bimo. 1999. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: ANDI.

Wibisono, Gunawan.1989. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Peremajaan Pasar*. Bandung.

Widjaja, HAW.2004.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

### **Undang-Undang**

UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

### **Internet**

Asrul. 2012. *Indonesia Butuh Kementrian Persampahan*. Diakses melalui [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)

<http://www.malangkab.go.id/konten-16.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 10925 /UN10.3/PG/2015

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan  
Kepanjen Kabupaten Malang  
Jl. Sumedang-Belakang Gedung Korpri Kepanjen, Kabupaten Malang  
Kepanjen, 65163

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan  
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Santos Rimba Bhirawan  
Alamat : Perum. Sawunggaling Indah No. 91 Kepanjen-Malang.  
NIM : 0810310119  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tema : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi pada Tempat Pengolahan  
Sampah Terpadu Sumedang Bersatu Desa Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen  
Kabupaten Malang)  
Lamanya : 1 Bulan  
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Agustus 2015  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU